

**GAYA DIPLOMASI TIONGKOK TERHADAP TAIWAN PADA
ERA KEPEMIMPINAN XI JINPING TAHUN 2017-2022**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial
(S. Sos.) dalam bidang Hubungan Internasional**



Oleh

ADELIA SYAFIRA ZALSYABILLAH

NIM I92218066

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JANUARI 2023**

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adelia Syafira Zalsyabillah

NIM : I92218066

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul **“Gaya Diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada Era Kepemimpinan Xi Jinping Tahun 2017-2022”**.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 9 Januari 2023

Yang menyatakan



Adelia Syafira Zalsyabillah

NIM I92218066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Adelia Syafira Zalsyabillah

NIM : 192218066

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul **“Gaya Diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada Era Kepemimpinan Xi Jinping Tahun 2017-2022”**. Skripsi ini telah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 9 Januari 2023

Pembimbing



Ridha Amaliyah. S.IP, MBA

NUP 201409001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Adelia Syafira Zalsyabillah dengan judul “Gaya Diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada Era Kepemimpinan Xi Jinping Tahun 2017-2022”. Telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Ridha Amaliyah, S.IP, MBA.
NUP 201409001

Penguji II



Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.
NIP 199104092020121012.

Penguji III



Zudan Rosyidi, SS. M.A.
NIP 198103232009121004

Penguji IV



Muhammad Oobidl Aimul Arif, S.I.P., M.A., CIQnR.
NIP 198408232015031002

Surabaya, 9 Januari 2023

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial

Dekan



Dr. Abd. Chalik, M.Ag.
197306272000031002

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adelia Syafira Zalsyabillah
NIM : 192218066
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Hubungan Internasional
E-mail address : adeliasyafira@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk membenarkan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Gaya Diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada Era Kepemimpinan Xi Jinping Tahun 2017-2022

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Januari 2023

Penulis

(Adelia Syafira Zalsyabillah)

ABSTRACT

Adelia Syafira Zalsyabillah, 2023, *China's Diplomacy Style towards Taiwan during Xi Jinping's Leadership Era in 2017-2022, Undergraduate Thesis of International Relations Department Faculty of Social and Political Sciences UIN Sunan Ampel Surabaya.*

Keywords: *China, Taiwan, Military, Country.*

This research aims to describe China's diplomatic style towards Taiwan during the Xi Jinping's leadership era in 2017-2022. This research uses qualitative-descriptive method with data collection techniques through documentation. The researcher uses Wolf Warrior Diplomacy concept initiated by Zhiqun Zhu. The results of this research are: China uses its country's military power through PLA establish 4 strategies, also send fighter jets and ships over Taiwan's territory, in order to intimidate Taiwan to stop trying to achieve its independence; China uses social media especially Twitter to influence perspectives and provoke interaction from the public at a large scale.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRAK

Adelia Syafira Zalsyabillah, 2023, Gaya Diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada Era Kepemimpinan Xi Jinping Tahun 2017-2022, *Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya*.

Kata Kunci: Tiongkok, Taiwan, Militer, Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan gaya diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada era kepemimpinan Xi Jinping tahun 2017-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Peneliti menggunakan konsep *Wolf Warrior Diplomacy* yang digagas oleh Zhiqun Zhu. Hasil dari penelitian ini: Tiongkok menggunakan kekuatan militer negaranya berupa PLA menetapkan 4 strategi, serta mengirim jet tempur dan kapal perang ke wilayah Taiwan, dengan tujuan mengintimidasi Taiwan agar berhenti berupaya mencapai kemerdekaannya; Melalui strategi politik, Tiongkok berupaya mengendalikan pihak lain agar tidak memberikan pengakuan terhadap Taiwan sebagai negara berdaulat, serta berupaya mencegah Tsai Ing-Wen memenangkan pemilihan presiden tahun 2020; Tiongkok menggunakan sosial media khususnya Twitter untuk mempengaruhi sudut pandang dan memancing interaksi dari publik secara luas.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Argumentasi Utama.....	18
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II KONSEP <i>WOLF WARRIOR DIPLOMACY</i>.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
B. Batasan Masalah.....	28
C. Lokasi dan Waktu.....	28
D. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisa.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisa Data.....	30

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	31
H. Tahap-Tahap Penelitian	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	34
A. Sejarah Hubungan Tiongkok dengan Taiwan.....	34
B. Kebijakan Luar Negeri Tiongkok terhadap Taiwan Sebelum Era Kepemimpinan Xi Jinping	43
1) Masa Kepemimpinan Deng Xiaoping	43
2) Masa Kepemimpinan Jiang Zemin	47
3) Masa Kepemimpinan Hu Jintao	53
C. Gaya Diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan Pada Era Kepemimpinan Xi Jinping Tahun 2017-2022	58
1) Menggunakan Kekuatan Militer Terhadap Taiwan (<i>Assertive</i>)	61
a. PLA Menetapkan 4 Strategi Militer	62
b. Menerbangkan Jet Tempur di Atas Wilayah Taiwan	63
c. Kapal Tiongkok Memasuki Perairan Taiwan	68
2) Mengendalikan Pihak serta Situasi untuk Mencegah Terwujudnya Kemerdekaan Taiwan (<i>Proactive</i>)	69
a. Melalui Strategi Front Persatuan Tiongkok	70
b. Memberikan Ultimatum kepada Negara-negara Lain	71
c. Mengendalikan Pemilihan Umum Taiwan	72
3) Diplomasi Tiongkok Melalui Sosial Media (<i>High-profile</i>)	74
a. Tiongkok Merespon Upaya Bergabungnya Taiwan Dalam PBB	75
b. Tiongkok Merespon Kedatangan Nancy Pelosi	75
c. Tiongkok Menegaskan Klaim Atas Taiwan	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

China atau disebut juga dengan Tiongkok¹ memiliki sejarah yang panjang dan cukup rumit dengan Taiwan. Dimulai pada tahun 1885, status Taiwan awalnya merupakan provinsi dari Tiongkok. Namun, pada tahun 1895 yakni pada saat berakhirnya Perang Jiawu, Tiongkok menyerahkan Taiwan kepada Jepang “selamanya”. Pernyataan ini, dimuat dalam isi Perjanjian Shimonoseki.² Pada 1 Januari 1912, Partai Nasionalis secara resmi mendirikan Tiongkok, mengakhiri lebih dari dua ribu tahun pemerintahan kekaisaran. Sebelum dimulainya Perang Dunia Kedua, Tiongkok mengalami perang saudara antara Chiang Kai-Shek dan Mao Zedong. Chiang adalah pemimpin Partai Nasionalis, yang juga dikenal sebagai partai Kuomintang. Sementara Mao, adalah kepala PKT.³

Partai Nasionalis awalnya berhasil menguasai Tiongkok. Bahkan hingga tahun 1945, saat Jepang diminta untuk mengembalikan Taiwan ke Tiongkok. Namun tak lama setelah berakhirnya Perang Dunia II, keadaan berubah. Mao

¹ Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor Se-06/Pres.Kab/6/1967, Tanggal 28 Juni 1967 yang dalam isinya memberlakukan Keputusan Presiden pada 12 Maret 2014 berbunyi “semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dan atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan atau komunitas Tionghoa, dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok”

² Kristine Yeh Koopman, “Taiwan's Path To Independence: Resolving The "One China" Dispute,” *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 18 (2016): 223, https://static1.squarespace.com/static/60a5863870f56068b0f097cd/t/60a5eff64444ce2a8b33bd9e/1621487606169/CAC107_crop.pdf.

³ "The Cairo Conference, 1943," U.S Department of State, diakses pada 26 Januari 2022, <https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/wwii/107184.htm>.

Zedong dan PKT berhasil mendirikan Republik Rakyat Tiongkok, di Tiongkok. Sedangkan Chiang dan Partai Nasionalis mundur ke Taiwan, untuk membentuk kembali Republik Tiongkok. Pada tahun 1949 Chiang bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai anggota pendiri.⁴ Muncul kekhawatiran dari Tiongkok, yang mengakibatkan Tiongkok mengancam akan menggunakan kekerasan, jika Taiwan secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan.⁵ Pada tahun 1971, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengubah kesetiaan dan mengakui Tiongkok sebagai pemerintah Tiongkok yang resmi, serta menghapus Taiwan dari anggotanya. Dengan demikian sejak 1971 Taiwan memiliki status yang tidak ditentukan, tidak di bawah kendali Tiongkok, namun tidak pula sebagai negara berdaulat sendiri.⁶

Konflik antara Taiwan dan Tiongkok masih terus terjadi, sebab Tiongkok ingin terus mendorong terwujudnya reunifikasi, namun Taiwan justru beberapa kali menunjukkan perilaku yang berpotensi untuk mewujudkan kemerdekaannya sendiri. Hal ini kemudian menjadi sebab lahirnya *One China Policy*, yakni merupakan pengakuan diplomatik atas posisi Tiongkok bahwa hanya ada satu pemerintahan Tiongkok. *One China Policy* mengatur jika suatu negara hanya dapat memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok, artinya tidak dapat memiliki

⁴ Kristine Yeh Koopman, "Taiwan's Path To Independence: Resolving The "One China" Dispute," *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 18 (2016): 224, https://static1.squarespace.com/static/60a5863870f56068b0f097cd/t/60a5eff64444ce2a8b33bd9e/1621487606169/CAC107_crop.pdf.

⁵ BBC, "What is the 'One China' policy?," *BBC News*, Oktober 6, 2021, diakses pada 26 Januari 2022, <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-38285354>.

⁶ Kristine Yeh Koopman, "Taiwan's Path To Independence: Resolving The "One China" Dispute," *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 18 (2016): 224, https://static1.squarespace.com/static/60a5863870f56068b0f097cd/t/60a5eff64444ce2a8b33bd9e/1621487606169/CAC107_crop.pdf.

hubungan diplomatik dengan Taiwan. Langkah ini diambil oleh Tiongkok agar Taiwan tidak mendapatkan pengakuan sebagai negara berdaulat.⁷

Pada masa kepemimpinan Jiang Zemin, Tiongkok cenderung mengambil cara-cara diplomatis dalam upaya reunifikasi. Salah satunya yakni dengan Tiongkok membuat proposisi tentang reunifikasi Taiwan yang berisikan delapan poin. Isi dari proposisi ini adalah upaya yang disarankan oleh Tiongkok dalam mencapai pemersatuan dengan damai serta sesuai dengan prinsip *One China Policy*, permintaan negosiasi antar pihak, serta penjelasan urgensi dari reunifikasi tersebut menurut Tiongkok.⁸

Presiden Hu Jintao tidak jauh berbeda dalam upayanya mewujudkan reunifikasi, dengan menawarkan enam usulan untuk pengembangan hubungan damai. Berisikan kesediaan Tiongkok untuk melakukan diskusi dengan Taiwan sehubungan dengan partisipasi Taiwan dalam Internasional selama tidak menimbulkan skenario “Dua Tiongkok” atau “Tiongkok dan Taiwan”, mengusulkan kerjasama dalam beberapa bidang, serta meminta konfrontasi militer untuk dihentikan.⁹

Pada masa kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok memiliki gaya diplomasi baru dan berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Gaya diplomasi ini

⁷ BBC, “What is the 'One China' policy?,” *BBC News*, Oktober 6, 2021, diakses pada 26 Januari 2022, <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-38285354>.

⁸ *Embassy of the People's Republic of China in the United States of America* “The 8-Point Proposition Made by President Jiang Zemin on China's Reunification”, *Embassy of the People's Republic of China in the United States of America*, diakses pada 27 Agustus 2022, http://us.china-embassy.gov.cn/eng/zt_120777/hxla/200310/t20031023_4912136.htm

⁹ *Consulate-General of People's Republic of China in Chicago* “President Hu Jintao offers 6 proposals for peaceful development of cross-strait relationship”, *Consulate-General of People's Republic of China in Chicago*, Desember 31, 2008, diakses pada 27 Agustus 2022, http://chicago.china-consulate.gov.cn/eng/zt/taiwanissue/200812/t20081231_5424930.htm

mendapatkan popularitas di kalangan akademisi yang dijuluki dengan “*Wolf Warrior Diplomacy*”. Dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh Zhiqun Zhu dengan judul “*Interpreting China’s Wolf-Warrior Diplomacy*” dipaparkan bahwa diplomasi Tiongkok di masa pemerintahan Xi Jinping bertransisi menjadi bersifat *assertive*, *proactive*, dan *high-profile*.¹⁰ *Assertive* yang dimaksud adalah gaya diplomasi Tiongkok yang terlihat menunjukkan kepercayaan diri dan kuat. *Proactive* yang dimaksud yakni gaya diplomasi Tiongkok yang memilih untuk menciptakan atau mengendalikan situasi dengan melakukan sesuatu sebagai bentuk pencegahan dari pada membiarkan hal yang ditakutkan terjadi, kemudian harus memberikan tanggapan terhadap hal tersebut. *High-profile* yang dimaksud ialah gaya diplomasi Tiongkok yang menarik banyak perhatian dan publisitas. Peter Martin kemudian membahas lebih jauh dalam bukunya ‘*China’s Civilian Army: The Making of Wolf Warrior Diplomacy (2021)*’.¹¹ *Wolf Warrior Diplomacy* dinamai berdasarkan film Tiongkok dengan judul ‘*Wolf Warrior*’ dan ‘*Wolf Warrior II*’. Film ini dinilai sesuai untuk menggambarkan Tiongkok yang memiliki gaya konfrontatif dalam membela kepentingan nasionalnya.¹²

Gaya diplomasi baru yang dikenal dengan *Wolf Warrior Diplomacy* ini, tercermin pada sikap Tiongkok dalam menangkis segala campur tangan dan upaya untuk menggagalkan pencapaian kepentingan nasionalnya, serta dalam merespon

¹⁰ Zhiqun Zhu, “Interpreting China’s “Wolf-Warrior Diplomacy”,” *Pacific Forum* (2020): 1-2

¹¹ Joanna Nawrotkiewicz, “Understanding Chinese “Wolf Warrior Diplomacy”,” *The National Bureau of Asian Research*, Oktober 22, 2021, diakses pada 20 Februari 2022, <https://www.nbr.org/publication/understanding-chinese-wolf-warrior-diplomacy/>

¹² Zhanna Malekos Smith, “New Tail for China’s ‘Wolf Warrior’ Diplomat,” *CSIS (Center for Strategic and International Studies)*, Oktober 13, 2021, diakses pada 20 Februari 2022, <https://www.csis.org/analysis/new-tail-chinas-wolf-warrior-diplomats>.

hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya.¹³ Gaya diplomasi Tiongkok yang mencerminkan karakteristik *Wolf Warrior Diplomacy* dapat dilihat melalui konfliknya dengan beberapa negara. Saat Australia menyerukan penyelidikan mandiri tentang asal-usul COVID-19. Tiongkok yang marah atas seruan Australia kemudian memberikan sanksi berupa membekukan ekspor Australia. Tiongkok beranggapan sanksi ini dapat mencederai kondisi ekonomi Australia.¹⁴ Melalui perang dagang bersama Amerika Serikat, yakni saat Amerika Serikat tidak menanggihkan tarif impor Tiongkok sebesar 25% untuk impor baja, serta 10% untuk impor aluminium. Tiongkok merespon dengan meluncurkan 128 produk Amerika Serikat yang akan dikenakan bea masuk ke Tiongkok sebesar 10-15%.¹⁵ Gaya kebijakan Tiongkok terhadap Australia dan Amerika ini mencerminkan karakteristik *assertive* yang dimiliki *Wolf Warrior Diplomacy*. Dilihat dari konfliknya dengan Australia, Tiongkok menunjukkan kekuatannya melalui kemampuan Tiongkok dalam mempengaruhi kondisi ekonomi negara Australia.¹⁶ Dalam isu perang dagang dengan Amerika, dianggap oleh Tiongkok sebagai cara untuk menunjukkan kekuatannya dalam ekonomi, sehingga Tiongkok dapat

¹³ Mohamed Bin Huwaidin dan Osman Antwi-Boateng, "The Rise of China as a Hegemonic Power: The Case for a Partial Peaceful Rise," *Journal of Regional Security* (2021): 7, doi: 10.5937/jrs0-31562

¹⁴ Jeffrey Wilson, "What Decoupling From China Looks Like," *Foreign Policy*, November 9, 2021, diakses pada 20 Februari 2022, <https://foreignpolicy.com/2021/11/09/australia-china-decoupling-trade-sanctions-coronavirus-geopolitics/>

¹⁵ Stephen R Nagy dan Hanh Nguyen, "Cowboy Diplomacy Meets Wolf Warrior Diplomacy: All Politics are Local" *Canadian Global Affairs Institute* (2020): 1-3

¹⁶ Hayati Nufus, Khanisa, R.A. Rizka Fiani Prabaningtyas, "Diplomasi Wolf Warrior Cina dan Relasi Cina-Australia di Masa Pandemi COVID-19" *Intermestic: Journal of International Studies* Volume 6 No. 2 (2022): 364, eISSN.2503 443X

dijadikan sebagai alternatif dalam tatanan internasional yang selama ini didominasi oleh Amerika Serikat.¹⁷

Saat Vietnam menuding Tiongkok menenggelamkan kapal nelayan di Pulau Paracel yang dianggap masih berada di dalam wilayah Vietnam, Tiongkok merespon hal ini dengan menuduh bahwa klaim Vietnam atas wilayah Pulau Paracel merupakan klaim ilegal. Menurut Tiongkok melalui klaim *nine-dash line*, pulau tersebut seharusnya merupakan bagian dari Tiongkok, sehingga keputusan Tiongkok dalam menenggelamkan kapal nelayan Vietnam merupakan hal yang tidak dapat disalahkan. Tiongkok kemudian mengumumkan penamaan terumbu karang, gunung, dan laut yang berada di sepanjang wilayah *nine-dash line* yang diklaim Tiongkok. Hal ini mencerminkan karakteristik *proactive* yang dimiliki *Wolf Warrior Diplomacy*. Melalui kebijakan tersebut, Tiongkok berusaha memperkuat klaimnya terhadap *nine-dash line*, agar kedepannya tidak ada negara lain yang menyusul perilaku Vietnam.¹⁸

Dalam konfliknya dengan Australia, Tiongkok menggunakan media sosial Twitter sebagai media untuk menggiring opini publik. Sehubungan dengan kemarahan Tiongkok karena Australia menyerukan penyelidikan mandiri tentang asal-usul COVID-19. Zhao Lijian yang merupakan seorang politisi Tiongkok serta wakil direktur Departemen Informasi Kementerian Luar Negeri Tiongkok menunjukan satu cuitan dengan foto tentara Australia yang seolah mengeksekusi anak perempuan, yang kemudian ditambah dengan cuitan bahwa Tiongkok

¹⁷ Stephen R Nagy dan Hanh Nguyen, "Cowboy Diplomacy Meets Wolf Warrior Diplomacy: All Politics are Local" *Canadian Global Affairs Institute* (2020): 2

¹⁸ Zhiqun Zhu, "Interpreting China's "Wolf-Warrior Diplomacy"," *Pacific Forum* (2020):

mengancam tentara Australia yang melakukan pembunuhan terhadap warga sipil Afganistan. Cuitan ini merupakan upaya Tiongkok dalam menggiring opini masyarakat setelah munculnya dugaan kejahatan perang Pasukan Khusus Australia saat bertugas di Afganistan.¹⁹

Taiwan sempat beberapa kali berupaya untuk merdeka sendiri, namun semenjak Tsai Ing-wen terpilih menjadi presiden Taiwan, kekhawatiran Tiongkok atas kemungkinan terwujudnya kemerdekaan Taiwan semakin meningkat. Adapun alasan lain yang memicu kekhawatiran, ialah karena keaktifan Amerika Serikat dalam menjual senjata militer terhadap Taiwan yang semakin meningkat semenjak masa kepemimpinan Donald Trump. Ditambah pada tahun 2017, Amerika Serikat menjual kapal selam kepada Taiwan.²⁰ Tiongkok selalu mendorong upaya reunifikasi dengan Taiwan, namun jika kemerdekaan Taiwan terwujud, maka Tiongkok gagal dalam mencapai salah satu prioritas utama dalam kepentingan nasionalnya.²¹

Gaya diplomasi Tiongkok yang baru di era Xi Jinping telah diterapkan ke negara-negara lain, sehingga mendorong peneliti untuk mengkaji bagaimana penerapannya terhadap Taiwan. Mengingat reunifikasi dengan Taiwan merupakan

¹⁹ Hayati Nufus, Khanisa, R.A. Rizka Fiani Prabaningtyas, "Diplomasi Wolf Warrior Cina dan Relasi Cina-Australia di Masa Pandemi COVID-19" *Intermestic: Journal of International Studies* Volume 6 No. 2 (2022): 366, eISSN.2503 443X

²⁰ Inneke Firsana Dewi dan Karina Utami Dewi, "Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok," *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 7, No. 2 (2019): 165, doi: 10.18196/72136

²¹ Benjamin Vazquez, "China's "Wolf Warrior" Diplomacy: A New Kind of American Exceptionalism?," *Toor Cummings Center for International Studies and the Liberal Arts (CISLA)* (2022): 14

salah satu prioritas utama dalam kepentingan negara Tiongkok, karena dianggap sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana gaya diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada era kepemimpinan Xi Jinping tahun 2017-2022?”

C. Tujuan Penelitian

Setelah peneliti mengetahui fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui gaya diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada era kepemimpinan Xi Jinping tahun 2017-2022.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, besar harapan peneliti untuk dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Akademis

Sebagai bahan acuan atau rujukan serta tambahan pandangan dalam studi Hubungan Internasional mengenai gaya diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada era kepemimpinan Xi Jinping tahun 2017-2022.

2) Manfaat Praktis

Sebagai patokan bagi pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan, sehubungan dengan gaya diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada era kepemimpinan Xi Jinping tahun 2017-2022.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti akan mengkaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, adapun karya ilmiah yang peneliti maksud adalah sebagai berikut:

1) Artikel jurnal yang ditulis oleh Eleanor Albert, dengan judul “*China-Taiwan Relations*”, artikel jurnal ini diterbitkan pada 7 Desember 2016

Artikel jurnal ini membahas tentang dinamika hubungan Tiongkok dengan Taiwan. Bagaimana melalui *1992 Consensus* Taiwan dan Tiongkok membingungkan status siapakah pemerintahan Tiongkok yang asli, namun keduanya setuju bahwasanya Taiwan merupakan milik Tiongkok, dikarenakan adanya perbedaan intepertasi dari keduanya terkait dengan konsensus tersebut. Serta dalam karya ilmiah ini juga menjelaskan bagaimana Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Tiongkok, namun tetap menjual senjata militer kepada Taiwan agar tidak tunduk terhadap Tiongkok. Kemudian, dalam karya ilmiah ini juga menjabarkan bagaimana kedua pihak berupaya saling mengungguli dalam segi militer. Serta bagaimana sebagian besar para penduduk Taiwan, mulai mengidentifikasi diri mereka sebagai “Taiwanese” bukan lagi sebagai “Chinese” maupun “Keduanya”. Sehingga dalam penelitian ini cenderung

menyoroti bagaimana dinamika hubungan kedua pihak serta bagaimana upaya Taiwan untuk merdeka sendiri yang mendapat dukungan dari warganya.²²

Persamaan yang dimiliki oleh artikel jurnal karya Eleanor ini dengan skripsi ini adalah, dalam skripsi ini peneliti juga menyorot terkait dengan dinamika kedua pihak serta upaya Taiwan dalam mewujudkan keinginan untuk merdeka sendiri. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah, dalam skripsi ini peneliti lebih cenderung berfokus pada gaya diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada era kepemimpinan Xi Jinping.

2) Artikel jurnal dengan judul “*China's Wolf Warrior Diplomacy on Social Media in the Era of COVID-19*” yang ditulis oleh Wiwiek Rukmi Dwi Astuti, Raden Maisa Yudono, dan Garcia Krisnando Nathanael. Artikel jurnal ini di publikasikan pada 27 Desember 2021.

Dalam karya ilmiah ini, ketiga peneliti menyoroti tentang bagaimana diplomasi secara signifikan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, serta Tiongkok yang berusaha membentuk citra serta opini baru melalui diplomatnya. Adapun pada masa COVID-19 ini, Tiongkok berusaha menciptakan citra yang baik sehubungan dengan bagaimana Tiongkok menangani pandemi. Penelitian ini berfokus pada Tiongkok yang melalui para diplomatnya berupaya dengan keras melawan lebel buruk yang diberikan terhadap Tiongkok, mengingat kasus pertama dari virus tersebut ditemukan pertama kali di Tiongkok. Penentangan keras dari diplomat Tiongkok yang disampaikan melalui media sosial ini merupakan gambaran

²² Eleanor Albert, “China-Taiwan Relation,” *Council on Foreign Relations* (2016): 2-5

penerapan dari *Wolf Warrior Diplomacy* melalui media sosial pada masa pandemi COVID-19.²³

Adapun persamaan dalam penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah, bagaimana *Wolf Warrior Diplomacy* ini, dalam upaya melawan negara-negara maupun publik yang mengganggu Tiongkok, maupun kepentingan nasionalnya. Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah, dalam penelitian ini tidak membahas apapun terkait dengan bagaimana *Wolf Warrior Diplomacy* ini diterapkan terhadap Taiwan.

3) Artikel jurnal yang ditulis oleh Yayao Dai dan Luwei Luqiu dengan judul “*Wolf Warriors and Xi Jinping’s Diplomacy: An Empirical Analysis of China’s Diplomatic Language*” pada Maret 2021.

Pembahasan dalam artikel jurnal ini adalah bagaimana presiden Xi Jinping dalam menerapkan diplomasi, kemudian dibandingkan dengan masa kepemimpinan presiden sebelumnya. Artikel jurnal ini cenderung berfokus pada menganalisis melalui bagaimana *Wolf Warrior Diplomacy* digunakan sebagai alat untuk melihat gaya diplomasi Tiongkok pada era kepemimpinan Xi Jinping, yang tercermin dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Xi Jinping dalam kesempatan berpidato, serta bagaimana Xi Jinping menanamkan “*a fighting spirit*”

²³ Wiwiek Rukmi Dwi Astuti, Raden Maisa Yudono, dan Garcia Krisnando Nathanael “China’s Wolf Warrior Diplomacy On Social Media In The Era Of Covid-19,” *Mandala Jurnal Hubungan Internasional* Vol.4 No.2 Juli-Desember (2021): 121-122

pada jajarannya di pemerintahan, sehingga dapat menerapkan gaya kebijakan yang sesuai dengan keinginan Xi Jinping.²⁴

Adapun persamaan dalam artikel jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah bagaimana gaya diplomasi Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping mencerminkan penerapan dari *Wolf Warrior Diplomacy*. Sedangkan, perbedaan yang dimiliki adalah dalam jurnal tersebut, penulis tidak mejabarkan secara spesifik penggunaannya terhadap Taiwan.

4) Artikel jurnal dengan judul “*Interpreting China’s “Wolf-Warrior Diplomacy”*” yang ditulis oleh Zhiqun Zhu pada Mei 2020

Dalam artikel jurnal ini penulis cenderung membahas tentang bagaimana negara-negara menilai *Wolf Warrior Diplomacy* yang saat ini diterapkan Tiongkok kepada musuh-musuhnya. Khususnya sikap Tiongkok kepada Amerika Serikat dan juga Australia, serta bagaimana Tiongkok menyikapi tuduhan Vietnam dalam kasus tuduhan peneggelaman kapal nelayan. Selain itu juga berfokus bagaimana *soft-diplomacy* Tiongkok yang seiring berjalannya hari semakin melemah selama masa pemerintahan Xi Jinping.²⁵

Adapun persamaan dalam artikel jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah penerapan *Wolf Warrior Diplomacy* sebagai bentuk perlawanan bagi negara-negara yang menjadi musuh Tiongkok. Namun yang menjadi pembeda adalah, dalam

²⁴ Yayao Dai dan Luwei Luqiu, “Wolf Warriors and Xi Jinping’s Diplomacy: An Empirical Analysis of China’s Diplomatic Language,” *Research Gate* (2021): 1-24

²⁵ Zhiqun Zhu, “Interpreting China’s “Wolf-Warrior Diplomacy”,” *Pacific Forum* (2020): 1-2

artikel jurnal tersebut tidak membahas penerapan gaya diplomasi *Wolf Warrior Diplomacy* Tiongkok terhadap Taiwan, yang dianggap sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.

5) Artikel jurnal yang ditulis Stephen R Nagy dan Hanh Nguyen, pada Oktober 2020, dengan judul “*Cowboy Diplomacy Meets Wolf Warrior Diplomacy: All Politics Are Local*”

Pada artikel jurnal tersebut, penulis cenderung menyoroti terkait dengan *Wolf Warrior Diplomacy* yang digunakan oleh Tiongkok, dalam perang dagang melawan Amerika Serikat. Tiongkok menggunakan gaya diplomasi tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap *Cowboy Diplomacy* yang diterapkan Amerika Serikat. Dalam penelitian tersebut, penulis memberikan penjabaran masing-masing gaya diplomasi dari kedua negara ini yang sama-sama agresif, dalam berupaya memenuhi kepentingan nasionalnya.²⁶

Adapun persamaan yang dimiliki oleh penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah, bagaimana Tiongkok menerapkan *Wolf Warrior Diplomacy* dalam melawan musuhnya, melalui cara-cara yang lebih agresif serta berani. Perbedaan, dalam penelitian tersebut berfokus dalam perlawanan Tiongkok terhadap Amerika yang menggunakan *Cowboy Diplomacy*. Sedangkan dalam skripsi ini, peneliti menggunakan gaya diplomasi Tiongkok yang disebut *Wolf Warrior Diplomacy* untuk melihat bagaimana penerapannya terhadap Taiwan.

²⁶ Stephen R Nagy dan Hanh Nguyen, “Cowboy Diplomacy Meets Wolf Warrior Diplomacy: All Politics are Local” *Canadian Global Affairs Institute* (2020): 1-3

6) Skripsi dengan judul “Hubungan Taiwan dan China dalam Status Kedaulatan Taiwan” milik Ian Sherridan

Pada penelitian berbentuk skripsi tersebut, cenderung berfokus pada alasan dan faktor dibalik tidak berdaulatnya Taiwan secara utuh. Kemudian juga berfokus pada pengaruh keterlibatan Tiongkok serta kepentingan Amerika Serikat yang dihubungkan terhadap apakah dampak yang diberikan jika Taiwan tetap tidak berdaulat. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan tiga konsep yakni Konsep Negara, Konsep Kedaulatan, serta Konsep Politik Luar Negeri.²⁷ Beberapa hal ini kemudian menjadi pembeda skripsi tersebut dengan penelitian ini. Penelitian ini berfokus terhadap penerapan dari perubahan gaya diplomasi Tiongkok di era Xi Jinping terhadap Taiwan. Adapun persamaan yang dimiliki adalah bagaimana dalam penelitian tersebut secara umum juga membahas Tiongkok dengan Taiwan. Seperti sejarah perpecahan, serta perang saudara antara Partai Nasionalis dan PKT.

7) Artikel jurnal yang ditulis oleh Sinta Dewi Farida Hidayat, dengan judul “Hubungan Tiongkok – Taiwan Pasca *Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA) 2010 – 2018”

Pada artikel jurnal tersebut, peneliti cenderung membahas tentang bagaimana hubungan ekonomi antara Tiongkok dengan Taiwan, serta bagaimana ECFA menghilangkan atau mengurangi hambatan perdagangan serta investasi. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwasanya hasil dari ECFA sendiri ialah dapat mengurangi ketegangan politik. Kemudian Tiongkok dan Taiwan saling

²⁷ Ian Sherridan, “Hubungan Taiwan dan China Dalam Status Kedaulatan Taiwan” (S-1 diss., Universitas Sumatra Utara, 2018)

mendapatkan keuntungan. Serta memberikan dampak kemajuan terhadap kondisi ekonomi, pariwisata, serta perdagangan pula.²⁸

Adapun yang menjadi kesamaan dari artikel jurnal tersebut dengan penelitian ini yakni membahas hubungan Tiongkok dengan Taiwan. Kemudian yang menjadi pembeda adalah bahwasanya penelitian tersebut cenderung berfokus terhadap sisi ekonomi, khususnya dampak dari ECFA. Sedangkan, dalam penelitian ini cenderung berfokus pada perubahan gaya diplomasi Tiongkok di era Xi Jinping diterapkan terhadap Taiwan yang dianggap sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.

8) Thesis milik Tian Li dengan judul “*The Future Relationships Between Mainland China and Taiwan*”

Pada thesis tersebut, peneliti membahas tentang kemungkinan perkembangan masalah antara Tiongkok dengan Taiwan, serta kemungkinan peningkatan hubungan anatara keduanya di masa depan. Dalam penelitian tersebut, peneliti mempertimbangkan segala skenario alternatif. Sehingga peneliti thesis tersebut dapat memberikan prediksi, bahwasanya pada masa mendatang Tiongkok dan Taiwan akan melakukan berbagai macam kerjasama. Kerjasama dalam bidang politik, pun ekonomi. Kerjasama tersebut akan diimbangi dengan berkurangnya

²⁸ Sinta Dewi Farida Hidayat, “Hubungan Tiongkok – Taiwan Pasca Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) 2010 – 2018,” *Universitas Komputer Indonesia* (2018): 8-10

konfrontasi militer. Walaupun demikian, peneliti dalam thesis ini juga menyebutkan bahwa reunifikasi tetap tidak akan terjadi.²⁹

Adapun perbedaan yang dimiliki oleh thesis tersebut dengan penelitian ini adalah, thesis tersebut bersifat prediktif serta berfokus pada membahas segala skenario yang mungkin terjadi dalam hubungan antara Tiongkok dengan Taiwan. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada menjabarkan perubahan dari gaya diplomasi Tiongkok diterapkan terhadap Taiwan. Persamaan yang dimiliki thesis tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang Tiongkok dengan Taiwan.

9) Artikel jurnal dengan judul “*Challenging China’s “Wolf Warrior” Diplomats*” yang ditulis oleh Dean Cheng

Pada artikel jurnal tersebut, peneliti membahas tentang dunia kini menghadapi Tiongkok yang berbeda dari sebelumnya. Tiongkok kini lebih modern, serta memiliki kekuatan yang baik dalam segi ekonomi dan militernya. Dengan kekuatan yang demikian, kini membuat Tiongkok jauh lebih berani dalam bersikap. Tercermin dari sikap para diplomatnya yang semakin keras dalam membalas kritik asing. Dalam beberapa kasus seperti saat COVID-19 terjadi, terdapat beberapa kritikan Amerika Serikat yang ditujukan kepada Tiongkok melalui media sosial Twitter. Diplomat Tiongkok langsung dengan cepat menjawab kritikan tersebut dengan Bahasa yang tidak begitu “diplomatis”. Dengan gaya yang demikian,

²⁹ Tian Li, “The Future Relationships Between Mainland China and Taiwan” (Masters Theses., Eastern Illinois University, 1998).

kemudian diplomat Tiongkok disebut menerapkan gaya “*Wolf Warrior*” dalam perilaku diplomasinya.³⁰

Adapun persamaan dari artikel jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah kesamaan dalam melihat kebijakan, serta perilaku diplomat Tiongkok, dalam menghadapi negara-negara lain. Diketahui juga sama-sama membahas bagaimana *Wolf Warrior Diplomacy* diterapkan saat Tiongkok menghadapi lawannya. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah bagaimana dalam jurnal tersebut sama sekali tidak membahas Tiongkok dengan Taiwan, justru cenderung membahas bagaimana gaya diplomasi diterapkan dalam melawan Amerika Serikat.

10) Artikel jurnal yang ditulis oleh Dr. Camille BRUGIER dengan judul ““*Wolf Warrior*” *Diplomacy: A New Policy To Legitimize The Chinese Communist Party*”

Artikel jurnal ini membahas tentang semenjak masa pemerintahan XI Jinping Tiongkok dinilai menerapkan kebijakan baru yang bersifat berani dan agresif. Model kebijakan yang demikian kemudian diberi nama oleh beberapa media barat yakni “*Wolf Warrior Diplomacy*”. Selain itu, nama tersebut diberikan tak lama setelah Tiongkok dengan tegas membalas segala kritikan yang ditujukan padanya selama masa pandemi COVID-19. Merujuk pada sikap para diplomat Tiongkok yang “dinilai” senang berperang melalui media dan jejaring sosial. Kemudian, dalam artikel jurnal ini juga membahas motif dari PKT yang

³⁰ Dean Cheng, “Challenging China’s “Wolf Warrior” Diplomats,” *Asian Studies Center* (2020) : 1-5

sebenarnya. Seperti melegitimasi PKT di mata warganya sendiri, baik yang berada di dalam negeri, maupun luar negeri.³¹

Adapun persamaan dari artikel jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang bagaimana sikap Tiongkok dalam melawan negara-negara lain. Serta alasan media barat memberikan nama “*Wolf Warrior Diplomacy*” merujuk pada Tiongkok yang melalui para diplomatnya menjadi lebih tegas dan agresif dalam bersikap. Sedangkan Adapun perbedaan dalam artikel jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah, artikel jurnal tersebut tidak membahas tentang penerapan dari perubahan gaya diplomasi Tiongkok ini diterapkan terhadap Taiwan. Dalam artikel jurnal tersebut justru membahas tentang motif sesungguhnya dari PKT, yakni ingin melegitimasi PKT di mata warganya.

F. Argumentasi Utama

Dilihat dari latar belakang serta fokus penelitian yang telah dijabarkan, peneliti berargumen bahwa gaya diplomasi Tiongkok yang baru pada masa kepemimpinan Xi Jinping, menerapkan *Wolf Warrior Diplomacy* yang memiliki karakteristik *assertive*, *proactive*, dan *high-profile*. Penerapan dari gaya kebijakan tersebut tidak hanya kepada negara-negara lain yang berlokasi diluar teritorialnya, melainkan juga diterapkan kepada Taiwan. Penerapan terhadap Taiwan cenderung berbeda dan lebih kompleks dari sekedar melalui sosial media, ataupun melalui gertakan dari para diplomat Tiongkok. Mengingat Tiongkok menganggap Taiwan

³¹ Camille Brugier, ““Wolf Warrior” Diplomacy: A New Policy To Legitimize The Chinese Communist Party,” *Institute for Strategic Research (IRSEM)* (2021) : 1-10

sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya, serta reunifikasi dengan Taiwan telah lama menjadi salah satu prioritas utama Tiongkok

G. Sistematika Penulisan

BAB I terdiri dari latar belakang yang memuat alasan peneliti mengambil topik tersebut. Fokus penelitian, memuat permasalahan yang hendak diteliti, kemudian nantinya akan digambarkan jawabannya dalam penelitian ini. Tujuan penelitian, memuat arah dari penelitian. Manfaat penelitian, memuat manfaat yang dapat diberikan setelah dilakukannya penelitian, baik secara akademis dan praktis. Tinjauan pustaka, mencantumkan referensi dari penelitian terdahulu. Argumentasi utama, menerangkan penataan pembahasan sebagai acuan. Selain itu, bab ini juga memuat gambaran umum terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

BAB II peneliti mencantumkan uraian sehubungan dengan konsep yang digunakan untuk menjawab fokus penelitian. Peneliti menggunakan konsep *Wolf Warrior Diplomacy* untuk melihat gaya diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada era Xi Jinping tahun 2017-2022.

BAB III peneliti mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bertujuan agar penyusunan penelitian ini dapat sistematis, maka bab metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, batasan masalah, lokasi dan waktu, subjek penelitian dan tingkat analisa, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik pemeriksaan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV merupakan inti dari penelitian, yang dimana akan menjawab rumusan masalah serta menyajikan hasil penelitian dan analisa secara sistematis

terkait dengan gaya diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada era kepemimpinan Xi Jinping tahun 2017-2022.

BAB V berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ditulis setelah peneliti menggambarkan gaya diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada era kepemimpinan Xi Jinping tahun 2017-2022. Sedangkan untuk saran, peneliti akan mencantumkan jalan keluar guna mengatasi masalah dan kelemahan yang ada.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP *WOLF WARRIOR DIPLOMACY*

Wolf Warrior Diplomacy adalah nama yang diambil dari film *blockbuster* tahun 2017 lalu, yakni “*Wolf Warrior 2*”. Film ini menceritakan tentang kisah sekelompok tentara Tiongkok, yang dikirim untuk menyelamatkan sekelompok warga sipil yang terdampar di negara Afrika, yang dimana sedang dilanda perang. Pada satu adegan, tokoh utama dari film yaitu Leng Feng, menggunakan panah otomatis untuk melawan tentara bayaran Amerika. Ketika Leng Feng membunuh bos dari tentara bayaran Amerika, ia mengatakan “Orang-orang sepertimu akan selalu lebih rendah dari orang-orang sepertiku”. Film ini berhasil meninggalkan kesan terhadap sebagian besar warga Tiongkok, seperti menyiratkan bahwa momen kebangkitan Tiongkok telah tiba, khususnya film tersebut memiliki *tagline* yang berbunyi, “Meskipun seribu mil jauhnya, siapa pun yang menghina Tiongkok akan membayar”. Menurut Peter Martin dalam bukunya yang berjudul “*China’s Civilian Army : The Making of Wolf Warrior Diplomacy*” sikap Tiongkok serta nilai-nilai yang digambarkan melalui film ini sangat sejalan dengan praktik politik Tiongkok selama masa pemerintahan Xi Jinping. Melalui film ini, warga negara Tiongkok beranggapan bahwa perubahan gaya kebijakan ini merupakan bentuk dari

kebangkitan Tiongkok, baik secara nasional maupun internasional. Sehingga warga Tiongkok memberikan dukungan penuh terhadap sikap Tiongkok yang baru.³²

Wolf Warrior Diplomacy Tiongkok pada dasarnya merupakan perubahan dalam gaya diplomasi Tiongkok. Dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh Zhiqun Zhu dengan judul “*Interpreting China’s “Wolf-Warrior Diplomacy”*” dipaparkan bahwa diplomasi Tiongkok di masa pemerintahan Xi Jinping bertransisi menjadi memiliki karakteristik yang *assertive, proactive, dan high-profile*.³³ Gaya diplomasi ini bertolak belakang dengan gaya diplomasi Tiongkok sebelumnya yang bersifat “*low profile and working behind the scenes*”. Gaya diplomasi yang sebelumnya sudah digunakan Tiongkok selama beberapa dekade tersebut, pertama kali diperkenalkan oleh Deng Xioping pada tahun 1980 melalui kalimat “Sembunyikan kekuatanmu, tunggu waktu, jangan pernah memimpin”.³⁴ Pada akhirnya *Wolf Warrior Diplomacy* adalah tentang kebangkitan politik karismatik di Tiongkok, serta tentang para rezim secara kolektif memberikan dukungan untuk gaya diplomasi di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Mengingat di Tiongkok saat ini, Xi Jinping merupakan pemimpin tertinggi. Naluri yang dimiliki Xi Jinping akan mendorong para pemerintahan Tiongkok, dan juga gaya diplomasinya untuk bertindak sesuai keinginan Xi Jinping. Mentalitas “*Wolf Pack*” yang dimiliki Xi Jinping ini secara langsung berdampak pada cara Tiongkok melakukan diplomasi, baik secara

³² Peter Martin, *China’s Civilian Army : The Making of Wolf Warrior Diplomacy* (New York, NY : Oxford University Press, 2021), 235

³³ Zhiqun Zhu, “Interpreting China’s “Wolf-Warrior Diplomacy”,” *Pacific Forum* (2020): 1-2

³⁴ Abdul Rasool Syed, “Wolf warriors: A brand new force of Chinese diplomats,” *Modern Diplomacy*, July, 2020, diakses pada 21 Maret 2022, <https://moderndiplomacy.eu/2020/07/14/wolf-warriors-a-brand-new-force-of-chinese-diplomats/>

bilateral, maupun multilateral.³⁵ Perubahan ini bertujuan untuk mengikutsertakan diaspora Tionghoa ke dalam kebijakan luar negeri Tiongkok melalui penekanan “loyalitas etnis di atas loyalitas nasional”.³⁶

Beberapa faktor yang mempengaruhi sikap Tiongkok menjadi lebih berani: (1) Tiongkok sekarang memiliki kondisi ekonomi yang kuat, serta dengan militer yang jauh lebih besar untuk mendukung kepercayaan diri Tiongkok; (2) Nasionalisme semakin menjadi inti dari legitimasi PKT, karena terjadinya pelambatan perkembangan ekonomi, oleh karena itu para pemimpin Tiongkok bersikap seolah tangguh untuk menyenangkan penduduknya; (3) Terdapat pergeseran generasi dalam kementerian luar negeri Tiongkok, yang kemudian telah menghasilkan sejumlah diplomat baru seperti Hua Chunying, yang berani melakukan diplomasi dengan cara yang lebih lantang, terbuka, dan tegas.³⁷

Zhiqun Zhu mendefinisikan indikator *assertive* yang dimaksud adalah ketika Tiongkok mengalami konflik dengan negara lain, ia cenderung menerapkan diplomasi yang menunjukkan kepercayaan diri dan menonjolkan *power* yang dimilikinya, dengan tujuan mengalahkan lawan atau membuat lawannya merasa terintimidasi. *Proactive* yang dimaksud yakni diplomasi Tiongkok yang cenderung memilih untuk menciptakan atau mengendalikan situasi dengan melakukan sesuatu,

³⁵ David Bandurski, “Xi Jinping: Leader of the Wolf Pack,” *Global Asia*, September, 2020, diakses pada 21 Maret 2022, https://www.globalasia.org/v15no3/focus/xi-jinping-leader-of-the-wolf-pack_david-bandurski

³⁶ Brian Wong, “How Chinese Nationalism Is Changing,” *The Diplomat*, May, 2020, diakses pada 21 Maret 2022, <https://thediplomat.com/2020/05/how-chinese-nationalism-is-changing/>

³⁷ Erwin Blaauw, “The driving forces behind China's foreign policy - has China become more assertive?,” *Rabobank Research – Economic Research*, Oktober, 2013, diakses pada 21 Maret 2022, <https://economics.rabobank.com/publications/2013/october/the-driving-forces-behind-chinas-foreign-policy-has-china-become-more-assertive/>

hal ini dilakukan Tiongkok sebagai bentuk pencegahan, karena menurutnya lebih baik melakukan pencegahan, daripada membiarkan hal yang ditakutkan terjadi dan kemudian harus memberikan tanggapan terhadap hal tersebut. *High-profile* yang dimaksud ialah diplomasi Tiongkok yang dilakukan untuk menarik banyak perhatian dan publisitas dari khalayak umum.

Gaya diplomasi baru yang dikenal dengan *Wolf Warrior Diplomacy* ini, tercermin pada sikap Tiongkok dalam menangkis segala campur tangan dan upaya untuk menggagalkan pencapaian kepentingan nasionalnya, serta dalam merespon hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya.³⁸ Gaya diplomasi Tiongkok yang mencerminkan karakteristik *Wolf Warrior Diplomacy* dapat dilihat melalui konfliknya dengan beberapa negara. Saat Australia menyerukan penyelidikan mandiri tentang asal-usul COVID-19. Tiongkok yang marah atas seruan Australia kemudian memberikan sanksi berupa membekukan ekspor Australia. Tiongkok beranggapan sanksi ini dapat mencederai kondisi ekonomi Australia.³⁹ Melalui perang dagang bersama Amerika Serikat, yakni saat Amerika Serikat tidak menanggihkan tarif impor Tiongkok sebesar 25% untuk impor baja, serta 10% untuk impor aluminium. Tiongkok merespon dengan meluncurkan 128 produk Amerika Serikat yang akan dikenakan bea masuk ke Tiongkok sebesar 10-15%.⁴⁰ Gaya kebijakan Tiongkok terhadap Australia dan Amerika ini mencerminkan

³⁸ Mohamed Bin Huwaidin dan Osman Antwi-Boateng, "The Rise of China as a Hegemonic Power: The Case for a Partial Peaceful Rise," *Journal of Regional Security* (2021): 7, doi: 10.5937/jrs0-31562

³⁹ Jeffrey Wilson, "What Decoupling From China Looks Like," *Foreign Policy*, November 9, 2021, diakses pada 20 Februari 2022, <https://foreignpolicy.com/2021/11/09/australia-china-decoupling-trade-sanctions-coronavirus-geopolitics/>

⁴⁰ Stephen R Nagy dan Hanh Nguyen, "Cowboy Diplomacy Meets Wolf Warrior Diplomacy: All Politics are Local" *Canadian Global Affairs Institute* (2020): 1-3

karakteristik *assertive* yang dimiliki *Wolf Warrior Diplomacy*. Dilihat dari konfliknya dengan Australia, Tiongkok menunjukkan kekuatannya melalui kemampuan Tiongkok dalam mempengaruhi kondisi ekonomi negara Australia.⁴¹ Dalam isu perang dagang dengan Amerika, dianggap oleh Tiongkok sebagai cara untuk menunjukkan kekuatannya dalam ekonomi, sehingga Tiongkok dapat dijadikan sebagai alternatif dalam tatanan internasional yang selama ini didominasi oleh Amerika Serikat.⁴²

Saat Vietnam menuding Tiongkok menenggelamkan kapal nelayan di Pulau Parcel yang dianggap masih berada di dalam wilayah Vietnam, Tiongkok merespon hal ini dengan menuduh bahwa klaim Vietnam atas wilayah Pulau Parcel merupakan klaim ilegal. Menurut Tiongkok melalui klaim *nine-dash line*, pulau tersebut seharusnya merupakan bagian dari Tiongkok, sehingga keputusan Tiongkok dalam menenggelamkan kapal nelayan Vietnam merupakan hal yang tidak dapat disalahkan. Tiongkok kemudian mengumumkan penamaan terumbu karang, gunung, dan laut yang berada di sepanjang wilayah *nine-dash line* yang diklaim Tiongkok. Hal ini mencerminkan karakteristik *proactive* yang dimiliki *Wolf Warrior Diplomacy*. Melalui kebijakan tersebut, Tiongkok berusaha memperkuat klaimnya terhadap *nine-dash line*, agar kedepannya tidak ada negara lain yang menyusul perilaku Vietnam.⁴³

⁴¹ Hayati Nufus, Khanisa, R.A. Rizka Fiani Prabaningtyas, "Diplomasi Wolf Warrior Cina dan Relasi Cina-Australia di Masa Pandemi COVID-19" *Intermestic: Journal of International Studies* Volume 6 No. 2 (2022): 364, eISSN.2503 443X

⁴² Stephen R Nagy dan Hanh Nguyen, "Cowboy Diplomacy Meets Wolf Warrior Diplomacy: All Politics are Local" *Canadian Global Affairs Institute* (2020): 2

⁴³ Zhiqun Zhu, "Interpreting China's "Wolf-Warrior Diplomacy"," *Pacific Forum* (2020):

Dalam konfliknya dengan Australia, Tiongkok menggunakan media sosial Twitter sebagai media untuk menggiring opini publik. Sehubungan dengan kemarahan Tiongkok karena Australia menyerukan penyelidikan mandiri tentang asal-usul COVID-19. Zhao Lijian yang merupakan seorang politisi Tiongkok serta wakil direktur Departemen Informasi Kementerian Luar Negeri Tiongkok menunjukan satu cuitan dengan foto tentara Australia yang seolah mengeksekusi anak perempuan, yang kemudian ditambah dengan cuitan bahwa Tiongkok mengecam tentara Australia yang melakukan pembunuhan terhadap warga sipil Afganistan. Cuitan ini merupakan upaya Tiongkok dalam menggiring opini masyarakat setelah munculnya dugaan kejahatan perang Pasukan Khusus Australia saat bertugas di Afganistan.⁴⁴

Berdasarkan kebijakan Tiongkok yang mencerminkan *Wolf Warrior Diplomacy* terhadap negara-negara lain, dapat diketahui indikator dari *assertive* yakni gaya diplomasi Tiongkok yang menggunakan *power* ekonomi dari negaranya. Indikator dari *proactive* yakni gaya diplomasi Tiongkok yang berusaha melakukan kebijakan dengan tujuan mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Indikator *high-profile* yakni kebijakan Tiongkok yang menggunakan media sosial, khususnya Twitter, untuk mendapatkan perhatian masyarakat secara luas dengan tujuan menggiring opini publik.

Berdasarkan indikator *assertive*, *proactive*, dan *high-profile* milik Zhiqun Zhu dan indikator dari penerapannya terhadap negara lain, peneliti kemudian

⁴⁴ Hayati Nufus, Khanisa, R.A. Rizka Fiani Prabaningtyas, "Diplomasi Wolf Warrior Cina dan Relasi Cina-Australia di Masa Pandemi COVID-19" *Intermestic: Journal of International Studies* Volume 6 No. 2 (2022): 366, eISSN.2503 443X

mendefinisikan *assertive* adalah gaya diplomasi Tiongkok yang menggunakan *power* negaranya. *Proactive* yang dimaksud ialah gaya diplomasi Tiongkok yang mengendalikan pihak serta situasi dengan tujuan pencegahan. *High-profile*, diartikan dalam penelitian ini sebagai gaya diplomasi melalui sosial media yang mendapat banyak perhatian dan tanggapan dari masyarakat secara luas, dengan tujuan menggiring opini masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian berjudul “Gaya Diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada Era Kepemimpinan Xi Jinping Tahun 2017-2022” ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian jenis Kualitatif. Berkaitan erat dan sesuai dengan pendapat Cresswell, yakni metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individual atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.⁴⁵ Selain itu, metode penelitian kualitatif sangat tepat untuk digunakan dalam menggambarkan suatu isu kontemporer serta mempelajari isu dari waktu ke waktu.⁴⁶ Dengan demikian, peneliti memilih metode penelitian kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan.

Kemudian dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode deskriptif, dengan tujuan untuk menjabarkan fakta yang terdapat di lapangan. Sehingga peneliti dapat menyampaikan lebih mendetail terkait dengan gaya diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada era kepemimpinan Xi Jinping tahun 2017-2022.

⁴⁵ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 3-4

⁴⁶ Jane Ritchie, dkk., *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers* (SAGE Publications Ltd, 2013) 5

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan batasan masalah di rentang tahun 2017-2022. Tahun 2017 merupakan tahun dimana upaya Taiwan untuk merdeka sendiri mulai dapat dibaca oleh Tiongkok, yang kemudian membuat Tiongkok khawatir. Alasan menggunakan batasan tahun hingga 2022 khususnya bulan Agustus, karena gaya diplomasi Tiongkok yang dijuluki dengan *Wolf Warrior Diplomacy* ini merujuk pada diplomasi yang diterapkan Tiongkok pada era kepemimpinan Xi Jinping, sehingga kebijakan ini masih terus berlangsung selama Xi Jinping masih menjadi pemimpin tertinggi di Tiongkok. Adapun alasan lainnya yakni karena kedatangan Nancy Pelosi ke Taiwan pada bulan Agustus membuat bulan tersebut menjadi bulan paling penuh ketegangan di tahun 2022.

C. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di tempat tinggal peneliti, karena data yang digunakan berasal dari dokumen yang dapat di analisis. Data yang di dapat berasal dari platform *online* seperti *website*, portal berita *online*, serta sumber-sumber referensi yang relevan lainnya. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Februari 2022.

D. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisa

Guna memahami lebih dalam terkait dengan masalah yang akan diteliti, sangat diperlukan untuk menentukan subjek. Penelitian menetapkan gaya diplomasi Tiongkok pada era kepemimpinan Xi Jinping merupakan subjek penelitian. Perubahan gaya diplomasi Tiongkok pada era kepemimpinan Xi Jinping menjadi

fokus utama dalam penelitian ini, yang kemudian akan digambarkan terkait bagaimana perubahan gaya diplomasi tersebut diterapkan terhadap Taiwan.

Mohtar Mas'ood menjelaskan bahwasanya terdapat lima tingkat analisis dalam Hubungan Internasional. Diantaranya yakni individu, perilaku kelompok, negara, kelompok negara, dan sistem internasional. Tingkat analisa data (*level of analysis*) dalam penelitian ini menggunakan level negara, yakni sebuah negara memiliki karakteristik dan perilaku yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negerinya, dengan memahami berbagai aktor di dalamnya yang memiliki kepentingan serta memiliki peran dalam pengambilan keputusan.⁴⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Melakukan pengumpulan bukti dalam sebuah riset merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dalam sebuah riset diperlukan penggunaan data yang luas dan empiris. Bukti yang didapatkan dari lapangan digunakan sebagai penunjang teori, serta anggapan dan kaidah yang didapat, akan dinilai keabsahannya secara logis. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik dokumentasi, yakni merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Pada era perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat sekarang ini, baik dokumen pribadi maupun dokumen resmi tidak lagi didokumentasikan secara konvensional dan manual. Tetapi, dokumen-dokumen disimpan dalam bentuk file di flashdisk, CD Rom, e-

⁴⁷ Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta: LP3ES, 1990), 40

mail, blog, web site dan sebagainya yang dapat diakses secara daring. Selain itu peneliti juga menggunakan Teknik penelusuran data *online* atau sekunder, yakni mengumpulkan data melalui internet baik oleh perseorangan, lembaga resmi, organisasi dan lain-lain. Peneliti juga memanfaatkan buku-buku elektronik (ebook), jurnal elektronik (e-journal) di internet yang menyediakan data yang diperlukan.⁴⁸ Dalam penelitian ini, data yang digunakan akan difokuskan pada gaya diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada era Kepemimpinan Xi Jinping Tahun 2017-2022.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan proses dimana data yang sudah dikumpulkan, akan disusun secara sistematis dalam penyusunannya, agar menghasilkan data yang mudah dipahami. Pada riset ini, peneliti menggunakan teknik analisa data model milik Miles dan Huberman, yang terterdiri dari 3 tahapan yakni kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴⁹

Penjelasan dari ketiga tahapan tersebut antara lain:

1. Kondensasi Data

Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan kegiatan meringkas, menentukan hal yang menjadi fokus, serta mencari pola pada hal yang penting. Dalam penelitian ini, gaya diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada era kepemimpinan Xi Jinping menjadi fokus, karena sesuai tema yang dipilih oleh

⁴⁸ Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I, Metodologi Penelitian (Kalimantan: Antasari Press, 2011), 85-87

⁴⁹ Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage, (1994)

peneliti. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dari sumber sekunder yang telah di kondensasi dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya dengan memberikan gambaran yang lebih dalam dan jelas

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data akan lebih baik jika selama proses melakukan analisis data, peneliti mendapatkan penyajian data yang otentik, seperti penggunaan grafik, tabel, hingga matriks. Namun, pada penelitian kualitatif penyajian data justru berupa teks yang dinarasikan. Penyajian data berupa narasi teks dalam penelitian kali ini ialah berupa uraian sehubungan dengan gaya diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada era kepemimpinan Xi Jinping. Contohnya, jumlah keseluruhan dari jet tempur yang masuk ke wilayah Taiwan di setiap tahunnya akan dinarasikan.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan didalam penelitian kualitatif ialah sebagai temuan baru yang pada penelitian terdahulu tidak ditemukan. Hal tersebut dapat merupakan deskripsi suatu obyek yang sebelumnya masih abu-abu. Pada penelitian kualitatif penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan diperoleh melalui pengkaitan gaya diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada era kepemimpinan Xi Jinping tahun 2017-2019 dengan konsep *Wolf Warrior Diplomacy*.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan berbagai sumber yang memuat informasi serta penjabaran dari gaya diplomasi Tiongkok terhadap

Taiwan pada era kepemimpinan Xi Jinping, yang merupakan fokus dari penelitian ini. Sehingga kemudian dapat dibandingkan isi dari satu sumber dengan sumber lain dan dapat dipastikan bahwasanya tidak ada perbedaan makna atau penjabaran antara satu sumber dengan sumber lain.

H. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini, peneliti akan membuat sebuah riset kecil dalam menentukan tema serta fenomena yang diangkat dalam skripsi. Dengan demikian peneliti memutuskan untuk menggunakan gaya diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada era kepemimpinan Xi Jinping tahun 2017-2019. Kemudian, dilanjutkan dengan peneliti mengumpulkan data-data yang relevan dengan tema serta menentukan gap penelitian sehingga rumusan masalah.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, peneliti mengumpulkan serta menyusun data yang ditemukan melalui *website*, portal berita *online*, jurnal dan buku sebagai rujukan untuk menjawab bagaimana gaya diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada era kepemimpinan Xi Jinping tahun 2017-2019. Selanjutnya data tersebut dikelompokkan guna memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

3. Tahap Analisa Data

Pada tahapan ini, data yang telah dikumpulkan dan digabungkan kemudian dianalisis menggunakan konsep *Wolf Warrior Diplomacy*, sehingga dapat menghasilkan data yang lebih mudah dipahami.

4. Tahap Laporan

Pada tahap laporan, peneliti menyajikan pembahasan dari gaya diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada era kepemimpinan Xi Jinping tahun 2017-2019. Pembahasan yang disajikan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Selain itu, juga penjabaran analisis gaya diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada era kepemimpinan Xi Jinping tahun 2017-2019 yang di analisa menggunakan konsep *Wolf Warrior Diplomacy*. Laporan ini disajikan dalam bentuk skripsi yang sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi milik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sejarah Hubungan Tiongkok dengan Taiwan

Tiongkok dan Taiwan memiliki sejarah yang cukup panjang dan rumit. Diawali pada tahun 1684 yakni era dinasti Qing, Taiwan jatuh menjadi milik Tiongkok, namun baru secara resmi berstatus menjadi provinsi bagian dari Tiongkok pada tahun 1885.⁵⁰ Status Taiwan ini tidak bertahan lama dikarenakan terjadinya perang pertama antara Tiongkok-Jepang, atau dikenal pula dengan perang Jiawu. Perang ini resmi diumumkan pada 1 Agustus tahun 1894. Perang ini menjadi titik awal munculnya Jepang sebagai negara dengan kekuatan besar di dunia, dan sebagai pertanda melemahnya kekaisaran Tiongkok. Para pengamat asing memprediksi Tiongkok akan dengan mudah mengalahkan Jepang dikarenakan Tiongkok memiliki pasukan yang lebih besar, namun dalam perang ini Jepang telah melakukan modernisasi yang menghasilkan persiapan persenjataan yang lebih matang sehingga jauh lebih siap. Pasukan Jepang memenangkan perang ini dengan cepat dan luar biasa, baik di darat maupun laut.⁵¹ Pada maret tahun 1895 Jepang telah berhasil menginvasi dua provinsi Tiongkok, yakni provinsi Shandong

⁵⁰ Kristine Yeh Koopman, "Taiwan's Path To Independence: Resolving The "One China" Dispute," *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 18 (2016): 223, https://static1.squarespace.com/static/60a5863870f56068b0f097cd/t/60a5eff64444ce2a8b33bd9e/1621487606169/CAC107_crop.pdf.

⁵¹ Britanica, "First Sino-Japanese War," *Britanica*, July, 2022, diakses pada 4 Oktober 2022, <https://www.britannica.com/event/First-Sino-Japanese-War-1894-1895>

dan Manchuria. Tanggal 17 April 1895 ditandai sebagai akhir dari Perang Jiawu antara Tiongkok-Jepang, yakni dengan Tiongkok dan Jepang menandatangani Perjanjian Shimonoseki.⁵² Pasal 2 dalam perjanjian Shimonosheki memuat bahwasanya Tiongkok menyerahkan beberapa wilayah serta kedaulatan penuh wilayah tersebut kepada Jepang untuk selama-lamanya, termasuk semua benteng, gudang senjata, dan properti publik dalam wilayah tersebut. Bagian (b) dari pasal 2 ini menyatakan “*The island of Formosa, together with all islands appertaining or belonging to the said island of Formosa*”. Di bawah Pasal 2 bagian (b) inilah sebagai pertanda secara resmi Taiwan diserahkan kepada Jepang.⁵³

Jatuhnya sistem monarki di Tiongkok mengakibatkan terjadinya perang saudara di Tiongkok yang berlangsung pada tahun 1927 hingga 1949. Berakhirnya sistem monarki membuat negara dalam kekacauan dengan tidak memiliki bentuk pemerintahan yang terstruktur. Panglima perang serta para militer yang menguasai wilayah tertentu berlomba-lomba untuk berusaha mendapatkan kekuasaan. Dr. Sun Yat-sen yang memiliki peran penting dalam jatuhnya kekaisaran, berusaha untuk menemukan solusi dari masalah yang berkembang ini, namun ia tidak memiliki dukungan dari militer untuk rencananya. Rencana milik Dr. Sun Yat-Sen adalah menanamkan demokrasi di Tiongkok, namun ia meninggal pada tahun 1925 sebelum dapat memenuhi rencananya.⁵⁴

⁵² Ibid.

⁵³ USC University of Southern California, “Treaty Of Shimonoseki, 1895,” USC University of Southern California, diakses pada 4 Oktober 2022, <https://china.usc.edu/treaty-shimonoseki-1895>

⁵⁴ Jennifer Lynn Cucchisi, “The Causes and Effects of the Chinese Civil War, 1927-1949,” Seton Hall University Dissertations and Theses (2002): 19

Chiang Kai-Shek, yang merupakan salah satu pengikut Dr. Sun Yat-Sen serta kepala akademi Whampoa, pada 1926 memutuskan untuk melanjutkan rencana dari Dr. Sun Yat-Sen. Disaat yang bersamaan, PKT telah mendapatkan popularitasnya di Tiongkok. Masa pelatihannya di Uni Soviet, ia telah menyaksikan bagaimana komunisme diterapkan. Ia tidak menyukai bentuk dari pemerintahan komunisme, yang membuatnya mengubah misinya, yakni menjadi upaya menjauhkan komunisme dari China. Chiang Kai-Shek tetap tidak dapat mempercayai PKT. Walaupun sebelum meninggalnya Dr. Sun Yat-Sen, ia sempat mendirikan front persatuan kedua partai pada Agustus 1922. Chiang Kai-Shek memiliki keyakinan bahwasanya PKT akan bertambah besar dan mengambil alih Tiongkok, sehingga pada tahun 1927 ia berusaha menghabisi seluruh anggota PKT. Banyak dari anggota PKT berhasil dibunuh, namun Mao Zedong berhasil kabur dari peristiwa ini, yang kemudian menduduki peran penting dalam PKT.⁵⁵

Namun pada tahun 1937, Jepang menyerang Tiongkok, yang mengubah arah prioritas Tiongkok. Chiang Kai-Shek harus memastikan Jepang tidak mengambil alih Tiongkok, sehingga ia tidak dapat berfokus pada PKT. Bagaimanapun Chiang Kai-Shek tetap tidak berhenti dalam melawan PKT, yang kemudian menyebabkan banyak warga Tiongkok merasa bahwasanya Chiang Kai-Shek tidak fokus dalam mengalahkan Jepang, yang dimana seharusnya menjadi fokus utama. Dengan demikian Chiang Kai-Shek memiliki kebingungan dalam

⁵⁵ Ibid. hlm 20

fokusnya. Kebimbangan ini dimanfaatkan oleh PKT untuk membangun memperkuat dan menambah pengikutnya kembali.⁵⁶

Taiwan secara resmi menjadi milik Jepang hingga akhir Perang Dunia II. Melalui *Cairo Declaration* yang memuat konsolidasi operasi militer dalam melawan Jepang serta menyatakan bahwa Jepang akan dilucuti dari semua pulau Pasifik yang telah direbut atau diduduki. Deklarasi ini pertama kali dikeluarkan pada bulan Desember 1943, namun pembahasan telah dilakukan sejak bulan November 1943. Chiang Kai-Shek, bersama dengan Presiden Franklin D. Roosevelt, serta Perdana Menteri Winston Churchill, yang masing-masing membawa penasihat militer dan diplomatiknya bertemu dan berunding di Kairo. Pernyataan yang dimuat dalam *Cairo Declaration* secara lebih lengkap adalah sebagai berikut:

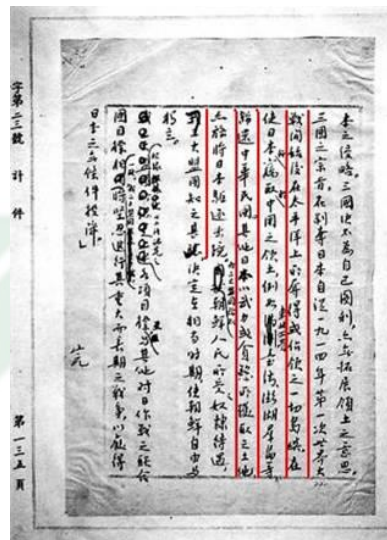
“The several military missions have agreed upon future military operations against Japan. They covet no gain for themselves and have no thought of territorial expectation. It is their purpose that Japan shall be stripped of all the islands in the Pacific which she has seized or occupied since the beginning of the first World War in 1914, and that all the territories Japan has stolen from the Chinese, such as Manchuria, Formosa, and the Pescadores, shall be restored to the Republic of China. Japan will also be expelled from all other territories which she has taken by violence and greed. The aforesaid three great powers, mindful of the enslavement of the people of Korea, are determined that in due course Korea shall become free and independent.”

*“With these objects in view the three Allies, in harmony with those of the United Nations at war with Japan, will continue to persevere in the serious and prolonged operations necessary to procure the unconditional surrender of Japan.”*⁵⁷

⁵⁶ Ibid. hlm 21

⁵⁷ *Diaoyu Dao*, “Diaoyu Dao: The Inherent Territory of China” *Diaoyu Dao*, 2014, diakses pada 7 November 2022 http://www.diaoyudao.org.cn/en/2015-01/25/content_34649421.htm

Pernyataan tersebut di muat dalam *Cairo Declaration* yang dibuat dalam dua versi Bahasa, yakni Bahasa Tionghoa dan Bahasa Inggris. Pernyataan asli dalam bahasa Tionghoa adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Chinese Version of the Cairo Declaration

(https://www.diaoyudao.org.cn/en/2015-01/25/content_34649421.htm)

Tiongkok, Amerika Serikat, dan Britania Raya membuat deklarasi lanjutan dari *Cairo Declaration*. Deklarasi ini disebut dengan *Potsdam Declaration*, yang dibuat di Konferensi Potsdam sekitar akhir Perang Dunia II, yakni pada 26 juli 1945. Presiden Amerika Serikat, bersama dengan Perdana Menteri Britania Raya yakni Winston Churchill, serta pemimpin Partai Nasionalis Tiongkok yakni Chiang Kai-Shek memutuskan untuk membuat ultimatum melalui rancangan deklarasi yang memuat permintaan agar Jepang menyudahi perang. Deklarasi ini juga memuat klaim bahwasanya penasihat Jepang telah melakukan perhitungan yang tidak cerdas, yang mengakibatkan Jepang berada dalam ambang kehancuran. Pernyataan lanjutan yang dimuat dalam deklarasi ini adalah penjabaran terkait

dengan pelucutan senjata secara total, penyerahan kembali daerah-daerah yang diduduki Jepang, serta membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab. Deklarasi ini tidak hanya memuat permintaan, namun juga memuat janji dari pihak Tiongkok, Amerika Serikat, dan Britania Raya yang berbunyi bahwasanya Jepang tidak akan di hancurkan sebagai sebuah bangsa, ataupun ditindas sebagai ras. Deklarasi ini diakhiri dengan kemungkinan untuk dilakukannya “*prompt and utter destruction*” jika Jepang tidak menyerah tanpa syarat.⁵⁸

Jepang resmi menyerah pada bulan Agustus 1945, namun hal ini tidak menjadi akhir dari konflik Tiongkok.⁵⁹ PKT dan Partai Nasionalis membuat janji temu setelah berakhirnya perang dengan Jepang dengan Jepang menerima *Potsdam Declaration*. Pertemuan kedua pihak dilakukan di Chongqing pada 28 Agustus 1945, dengan Mao yang didampingi oleh Patrick Hurley selaku duta besar Amerika Serikat. Pembicaraan ini bertujuan untuk menyelesaikan krisis kepemimpinan Tiongkok setelah Perang Dunia Kedua. Pembicaraan menghabiskan waktu berminggu-minggu.⁶⁰ Amerika Serikat khawatir akan pecahnya perang antara kedua belah pihak. Sehubungan dengan ini, Harry S. Truman selaku presiden Amerika Serikat, mengirimkan George C. Marshall. Tujuan dikirimnya George C. Marshall pada bulan Desember 1945, adalah untuk membuat kedua belah pihak

⁵⁸ Office of the Historian, Foreign Service Institute United States Department of State “Foreign Relations Of The United States: Diplomatic Papers, The Conference Of Berlin (The Potsdam Conference), 1945, Volume II,” Office of the Historian, Foreign Service Institute United States Department of State, diakses pada 29 Desember 2022, <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945Berlinv02/d1382>

⁵⁹ Constitutional Rights Foundation, “The Chinese Civil War: Why Did The Communists Win?” Constitutional Rights Foundation Volume 29 No.4 (2014) : 2

⁶⁰ James Carter, “The Last Meeting of Mao Zedong and Chiang Kai-shek,” The China Project, Agustus, 2022, diakses pada 28 Desember 2022, <https://thechinaproject.com/2021/08/25/the-last-meeting-of-mao-zedong-and-chiang-kai-shek/>

kembali melakukan perundingan. Upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil, dikarenakan justru gencatan senjata telah disepakati oleh kedua pihak untuk dilakukan pada 10 Januari 1946, bahkan saat George C. Marshall masih berada di Tiongkok.⁶¹ Dalam menangani hal ini, Konferensi Konsultatif Politik dibentuk pada tanggal 31 Januari 1946. Merupakan sebuah badan yang beranggotakan perwakilan dari segala spektrum politik Tiongkok. Konferensi ini menghasilkan beberapa kesepakatan sehubungan dengan hal-hal berikut:

1. Reorganisasi pemerintahan dan memperluas perwakilannya
2. Pertemuan majelis nasional pada tanggal 5 Mei 1946 dengan tujuan untuk mengadopsi konstitusi
3. Prinsip-prinsip reformasi politik, ekonomi, dan sosial
4. Penyatuan komando militer.⁶²

PKT memiliki kesempatan lebih besar dalam memenangkan perang ini. Meskipun PKT tidak menguasai kota-kota besar setelah Perang Dunia II, mereka memiliki dukungan yang kuat, organisasi dan moral militer yang unggul, serta persediaan senjata dalam jumlah besar. Sedangkan dukungan untuk Partai Nasionalis semakin menurun seiring dengan bertahun-tahun terjadinya salah kepemimpinan, inflasi yang tinggi, kehilangan kepercayaan dari masyarakat, kegagalan bantuan dari Amerika Serikat, lambatnya reformasi sosial dan ekonomi. Awal tahun 1947, Partai Nasionalis berencana mundur ke Taiwan, namun baru

⁶¹ Lary, Diana, *China's Civil War : A Social History, 1945-1949*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2015)

⁶² Britannica, "Chinese Civil War", diakses pada 14 November 2022, <https://www.britannica.com/event/Chinese-Civil-War>

terlaksana setelah pada 1 Oktober 1949 PKT secara resmi memproklamkan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Pada titik ini Partai Nasionalis mendirikan Republik Tiongkok di wilayah Taiwan, namun masih memiliki tekad kuat untuk kembali ke Tiongkok.⁶³

Kedua pihak sama-sama merasa bahwa merekalah Tiongkok yang asli, sehingga usaha untuk mendapatkan pengakuan dunia selalu dilakukan. Partai Nasionalis atau Republik Tiongkok telah mewakili Tiongkok secara keseluruhan dalam berdirinya PBB sejak 1945. Dalam daftar 51 negara anggota pendiri PBB, Republik Tiongkok berada di urutan pertama yang resmi bergabung dengan menandatangani Piagam PBB pada 26 Juni 1945 dan resmi meratifikasi pada 28 September 1945.⁶⁴ Dengan dukungan Amerika Serikat, Republik Tiongkok berhasil mempertahankan keanggotaannya di PBB serta kursi tetapnya di Dewan Keamanan PBB, namun terjadi gelombang pertama dari pergeseran pengakuan diplomatik yang dimulai pada 1949 hingga sekitar awal dari tahun 1950. Pergeseran pengakuan diplomatik ini diakibatkan oleh mundurnya Partai Nasionalis ke Taiwan. Pada tahun 1971, semakin banyak negara yang mengakui serta menyuarakan dukungan mereka terhadap Republik Rakyat Tiongkok, untuk menjadi bagian dari PBB sebagai Tiongkok. Hal yang menjadi pertimbangan dari keputusan ini ialah kenyataan bahwasanya PKT memegang kendali yang lebih besar atas Tiongkok.⁶⁵ Pada 25

⁶³ Deni Adi Wijaya, dkk, "Konflik Perebutan Kekuasaan Antara Kaum Nasionalis Dan Komunis Di Republik Tiongkok Tahun 1912-1949," *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember (UNEJ)* (2015): 11

⁶⁴ UN Research, "Founding Member States," *UN Research*, diakses pada 22 November 2022, <https://research.un.org/en/unmembers/founders>

⁶⁵ Thomas J. Shattuck, "A New Type of Diplomacy: Taiwan 50 Years after UN Expulsion," *Foreign Policy Research Institute*, October, 2021, diakses pada 22 November 2022,

Oktober 1971 delegasi dari Republik Tiongkok atau Taiwan secara resmi meninggalkan PBB. Perginya Taiwan ini dilatar belakangi oleh apa yang dimuat dalam Resolusi 2758, yakni dorongan untuk perwakilan dari Chiang Kai-Shek agar segera meninggalkan kursi yang diduduki karena dianggap tidak sah sebagai anggota dari PBB, serta meninggalkan segala organisasi yang terakit dengan PBB. Sebagai dampak lanjutan dari hal ini, Taiwan sering dikucilkan dari beberapa organisasi, khususnya yang berafiliasi dengan PBB.⁶⁶

Upaya untuk mendapatkan pengakuan secara diplomatik dalam skala Internasional masih terus berlanjut. Menjadi sebab lahirnya *One China Policy*, yakni merupakan pengakuan diplomatik atas posisi Tiongkok bahwa hanya ada satu pemerintah Tiongkok. Di bawah *One China Policy*, Amerika Serikat mengakui dan hanya akan memiliki hubungan formal dengan Tiongkok. Hubungan diplomatik formal antara kedua negara ini resmi dimulai pada 1979. Sebagai konsekuensi dari peresmian tersebut, Amerika Serikat memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan menutup kedutaannya di Taipei. Amerika Serikat membuat keputusan baru yang cukup membingungkan, yakni dengan tidak sepenuhnya meletakkan loyalitasnya terhadap *One China Policy*. Pada tahun yang sama Amerika Serikat juga mengesahkan *Taiwan Relations Act* yang menjamin dukungan untuk Taiwan. Melalui *Taiwan Relations Act* ini, Amerika Serikat menyatakan bahwa akan

<https://www.fpri.org/article/2021/10/a-new-type-of-diplomacy-taiwan-50-years-after-un-expulsion/>

⁶⁶ Sigrid Winkler, "Taiwan's UN Dilemma: To Be or Not To Be," *The Brookings Institution*, June, 2012, diakses pada 22 November 2022, <https://www.brookings.edu/opinions/taiwans-un-dilemma-to-be-or-not-to-be/>

membantu Taiwan untuk mempertahankan diri dan menjual senjatanya ke Taiwan.⁶⁷

B. Kebijakan Luar Negeri Tiongkok terhadap Taiwan Sebelum Era Kepemimpinan Xi Jinping

Tiongkok dan Taiwan tidak selalu mengalami ketegangan, terkadang juga dalam penentuan kebijakannya justru memilih cara-cara yang lebih diplomatis. Penentuan kebijakan di Tiongkok berada pada tangan seorang *Paramount Leader* atau *Supreme Leader*, yakni merupakan pemimpin tertinggi di Tiongkok sehingga memiliki ranah kekuasaan yang sangat luas, baik secara kenegaraan dan masyarakatnya. Seorang *Paramount Leader* selaku pemegang kekuasaan tertinggi, serta memiliki kontrol keseluruhan di Tiongkok, dapat menentukan kebijakan apapun terkait dengan kepentingan negaranya.⁶⁸ Sama halnya setiap *Paramount Leader* sebelum Xi Jinping yang juga memiliki gaya kebijakannya masing-masing, untuk diterapkan terhadap Taiwan sebagai upaya mendorong reunifikasi.

1. Masa Kepemimpinan Deng Xiaoping

Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Mao Zedong, Deng Xiaoping menjadi pemimpin selanjutnya. Resmi menggantikan pada tahun 1978, sikap Tiongkok terhadap Taiwan mengalami perubahan. Deng Xiaoping memilih untuk mengganti gaya kebijakan yang diterapkan oleh Mao Zedong, yakni dengan menerapkan upaya *peaceful reunification*. Tekad dari Deng Xiaoping dalam upaya

⁶⁷ BBC News, "What is the 'One China' policy?," *BBC News*, Oktober, 2021, diakses pada 26 Januari 2022, <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-38285354>.

⁶⁸ Susan V. Lawrence dan Michael F. Martin, "Understanding China's Political System," *Congressional Research Service* (2013): 6-7

reunifikasi ini sangatlah kuat, walaupun ia mengetahui bahwa Amerika Serikat akan terus menjual senjata ke Taiwan. Deng Xiaoping menganggap perang saudara yang di alami oleh Tiongkok ini belum selesai jika belum berakhir dengan reunifikasi.⁶⁹

Upaya yang dilakukan oleh Deng Xiaoping sehubungan dengan *peaceful reunification*, adalah melalui mengembangkan tawaran-tawaran yang memungkinkan untuk menarik minat Taiwan. Tiongkok Menyusun dokumen baru yang berisikan rancangan kebijakannya terhadap Taiwan. Sebelum kebijakan ini disajikan kepada publik melalui pidato pada 30 September 1981, rancangan kebijakannya lebih dahulu ditunjukkan kepada Menteri Luar Negeri Inggris yakni Lord Carrington pada Maret 1981. Kebijakan yang ditawarkan kepada Taiwan ini disebut dengan “*Nine-Point Proposal*”, yakni memuat sembilan elemen dasar.⁷⁰ Pertama, pernyataan bahwasanya hanya terdapat “Satu Tiongkok”, serta Taiwan tidak akan berubah menjadi negara yang merdeka. Kedua, reunifikasi Tiongkok dengan Taiwan merupakan hal yang mutlak serta dorongan untuk segera menyepakati prinsip “Satu Tiongkok”. Ketiga, terjadinya reunifikasi harus sesuai dengan formula “*One Country Two System*”, yakni Taiwan tetap dapat mempertahankan hal-hal seperti ekonomi, sistem politik, serta militernya sendiri, dengan catatan Taipei harus memberikan pengakuan bahwa Tiongkok selaku pemerintahan tunggal. Keempat, perundingan untuk reunifikasi harus dilaksanakan sesegera mungkin.⁷¹

⁶⁹ Ezra F. Vogel, *Deng Xiaoping and the Transformation of China* (Cambridge: The Belknap Press Of Harvard University Press, 2011), 408

⁷⁰ Ibid. hlm 411

⁷¹ Putri Anastasya Wulandari, “Kemerdekaan Taiwan Pada Masa Presiden Hu Jintao (2003-2013)” (S-1 diss., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

Kelima, perundingan untuk reunifikasi hanya diperbolehkan untuk diwakili atas nama masing-masing partai bukan selaku perwakilan negara, karena menurut Tiongkok, Taiwan hanyalah provinsi. Keenam, masing-masing pihak harus mempromosikan interaksi *people to people*, sebagai bentuk dari proses reunifikasi secara halus. Ketujuh, diperlukannya kebijakan *three link* guna memfasilitasi kedua belah pihak. Kedelapan, sekalipun reunifikasi ini dijalankan secara damai, Tiongkok tetap memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan, guna mencegah Taiwan untuk berupaya memisahkan diri dari Tiongkok. Kesembilan, wewenang untuk mewakili Tiongkok dalam dunia Internasional sepenuhnya milik Tiongkok, sedangkan Taiwan hanya diperkenankan untuk memiliki kerjasama budaya dan ekonomi dengan negara asing bukan hubungan diplomatik.⁷²

Taiwan tidak memberikan respon apapun terhadap tawaran kebijakan tersebut.⁷³ Tiongkok kemudian memberikan kebijakan lanjutan yang sempat disinggung dalam tawaran kebijakan sebelumnya, yakni “*One Country Two System*”. Deng Xiaoping mengajukan gagasan tersebut pada 11 Januari 1982. Konsep ini digagas oleh Deng Xiaoping dengan memperhitungkan realitas Taiwan, yakni Taiwan yang juga menjunjung tinggi kedaulatannya. Di bawah kebijakan ini, Taiwan tetap dapat mempertahankan hal-hal seperti ekonomi, sistem politik, serta

⁷² Ibid.

⁷³ Ezra F. Vogel, *Deng Xiaoping and the Transformation of China* (Cambridge: The Belknap Press Of Harvard University Press, 2011), 411

militernya sendiri, namun tidak dapat melakukan hubungan diplomatik resmi seperti negara berdaulat.⁷⁴

Taiwan menentang semua tawaran kebijakan dari *peaceful reunification* milik Tiongkok melalui kebijakan “*Three Nos*” atau “Tiga Tidak”. Kebijakan ini menekankan tanpa kontak, tanpa negosiasi, dan tanpa kompromi terhadap Tiongkok. Kebijakan ini dikemukakan oleh pemimpin Partai Nasionalis Taiwan yakni Chiang Ching-kuo pada bulan April 1979.⁷⁵

Gaya politik Tiongkok pada masa kepemimpinan Deng Xiaoping mengacu pada prinsip “*watch dispassionately, act calmly, hide its talents, bide its time, and seek concrete achievements*”. Prinsip ini membuat Tiongkok lebih bersifat *low-profile* dalam setiap kebijakan luar negerinya, dan memilih opsi-opsi kebijakan yang diplomatis, seperti yang diterapkan terhadap pemilihan kebijakan-kebijakan terhadap upaya reunifikasi dengan Taiwan.⁷⁶ Adapun faktor lain yang mempengaruhi gaya kebijakan Tiongkok untuk lebih diplomatis pada masa pemerintahan Deng Xiaoping ini, ialah karena lebih berfokusnya pada pertumbuhan ekonomi. Menyebabkan pergeseran fokus industri di Tiongkok, yang sebelumnya

⁷⁴ Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China, “A policy of “one country, two systems” on Taiwan,” *Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China*, diakses pada 2 Desember 2022, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/200011/t20001117_697847.html

⁷⁵ The Jakarta Post, “Timeline Of China-Taiwan Relations Leading To Historic Meet” *The Jakarta Post*, November, 2015, diakses pada 2 Desember 2022, <https://www.thejakartapost.com/news/2015/11/06/timeline-china-taiwan-relations-leading-historic-meet.html>

⁷⁶ Erwin Blaauw, “The Driving Forces Behind China's Foreign Policy - Has China Become More Assertive?,” *RaboResearch* (2013): 6, <https://economics.rabobank.com/publications/2013/october/the-driving-forces-behind-chinas-foreign-policy-has-china-become-more-assertive/#AnkerVoetnoot4>

mengutamakan produksi untuk kemajuan alat militer, menjadi produksi barang-barang sipil agar dapat menunjang aktivitas pasar domestik dan internasional.⁷⁷

2. Masa Kepemimpinan Jiang Zemin

Deng Xiaoping kemudian digantikan oleh Jiang Zemin. Pada masa kepemimpinan Jiang Zemin, Tiongkok mengumumkan “*Eight-Point Proposal*”. Proposal ini disampaikan melalui pidato dengan judul “Melanjutkan Perjuangan Menuju Reunifikasi Tiongkok”, pada 30 Januari 1995. Delapan poin yang diajukan yakni upaya-upaya pengembangan hubungan. Pertama, syarat dasar reunifikasi Tiongkok dan Taiwan harus berpegang pada prinsip “*One China*”, serta bersama-sama harus menentang campur tangan asing yang mencoba menghalangi upaya reunifikasi. Kedua, Tiongkok akan tetap membiarkan pengembangan hubungan secara nonpemerintah dalam sektor ekonomi dan budaya, namun akan menentang segala kegiatan kerjasama diplomatis resmi secara internasional, karena hal ini ditakutkan akan semakin memperkuat upaya Taiwan untuk merdeka. Ketiga, Tiongkok menginginkan agenda negosiasi untuk mencapai reunifikasi dengan damai, serta bersama menyepakati “*One China*”. Keempat, Tiongkok menyatakan bahwa tidak dapat berjanji untuk tidak menggunakan kekuatan militer dalam upaya reunifikasi, namun jika penggunaan militer ini terjadi, maka hal tersebut ditujukan untuk intervensi asing dalam upaya reunifikasi.⁷⁸

⁷⁷ Ibid. hlm 7

⁷⁸ China Daily, “Jan 30,1995: President Jiang Zemin puts forward eight propositions on development of relations between two sides of Taiwan Straits,” *China Daily*, Januari, 2011, diakses pada 9 Desember 2022, https://www.chinadaily.com.cn/china/19thcpcnationalcongress/2011-01/30/content_29715090.htm

Kelima, Tiongkok menawarkan untuk bersama mengembangkan hubungan kerjasama ekonomi, termasuk pertukaran barang, serta mendorong investasi di Taiwan. Tiongkok juga mendesak agar segera membuat kebijakan untuk mengatur beberapa hal tersebut, perlindungan investor, serta membuat perjanjian atas perlindungan hak dan kepentingan untuk industrialis dan pebisnis dari Taiwan. Keenam, Tiongkok menyatakan bahwasanya lima ribu tahun budaya yang indah telah diciptakan oleh seluruh kelompok etnis yang tinggal di Tiongkok dan Taiwan, ikatan inilah yang menjadikan dasar penting untuk dilakukannya reunifikasi. Ketujuh, Tiongkok menyatakan bahwa akan menghormati gaya hidup dan keinginan Taiwan untuk menjadi tuan di wilayah mereka sendiri, dalam hal ini Tiongkok akan menghormati kepentingan Taiwan, serta berupaya untuk menerima peran dari segala lapisan masyarakat dalam mencapai tujuan reunifikasi dengan damai. Kedelapan, Tiongkok menyampaikan keterbukaannya untuk menerima kunjungan dari Taiwan, juga bersedia mengunjungi Taiwan jika diminta, guna bertukar pendapat serta berdiskusi sehubungan dengan reunifikasi dengan damai.⁷⁹

Pada tahun yang sama, presiden Taiwan yakni Lee Teng-hui justru malah melakukan kunjungan ke Cornell University. Kunjungan ini merupakan undangan dari Amerika Serikat, dengan status Lee Teng-hui sebagai 'Presiden model demokrasi yang sedang berkembang dan mitra dagang terbesar kelima Amerika'. Kunjungan ini merupakan kunjungan tidak resmi, namun hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran Tiongkok. Tiongkok memandang bahwasanya Amerika Serikat memberikan dukungan terhadap upaya Taiwan dalam merdeka

⁷⁹ Ibid.

sendiri. Ketakutan lainnya adalah bahwa kunjungan secara tidak resmi mungkin terjadi kedepannya, jika hal ini dibiarkan.⁸⁰

Beberapa perwira senior dari PLA kemudian berpendapat bahwa Tiongkok harus segera mengambil kebijakan yang lebih tegas terhadap Amerika Serikat. Ditakutkan Amerika Serikat akan memperlakukan Tiongkok dengan cara yang tidak sopan, dalam langkah-langkahnya membantu Taiwan untuk dapat merdeka sendiri. Dalam hal ini, Tiongkok berusaha membuat kebijakan yang tepat agar Amerika Serikat tidak memandang aksi dari Tiongkok merupakan upaya memperebutkan Taiwan. Tiongkok tidak menginginkan terjadinya kerusakan hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat, yang nantinya tidak dapat dibenahi. Tiongkok berakhir memilih rekomendasi kebijakan untuk melakukan uji coba tembak rudal balistik series-M dengan jarak pendek. PLA kemudian diberi izin untuk latihan militer di dekat wilayah Taiwan. Hal ini semata dilakukan Tiongkok untuk menyoroti kerentanan Taiwan terhadap serangan rudal, namun Tiongkok dan Taiwan melakukan pensinyalan dan komunikasi yang baik untuk meminimalkan kesalahpahaman. Hal ini merupakan penerapan dari upaya dasar dalam melakukan diplomasi saat terjadinya suatu krisis atau konflik. Dalam saat bersamaan dengan terjadinya latihan militer PLA, Tiongkok dan Taiwan justru dalam proses membahas kerjasama di sektor perdagangan, ilmu pengetahuan, investasi, serta hubungan lintas selat.⁸¹

⁸⁰ Dr Gary Klintworth, "China and Taiwan-From Flashpoint to Redefining One China," *Parliament of Australia*, November, 2000, diakses pada 9 Desember 2022, [https://www.aph.gov.au/About Parliament/Parliamentary departments/Parliamentary Library/pubs/rp/rp0001/01RP15](https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp0001/01RP15)

⁸¹ Ibid.

Badan-badan intelijen di Taiwan selalu memiliki informasi yang baik tentang batas-batas aktivitas militer Tiongkok. Mantan Menteri Pertahanan Taiwan Chen Li-an mengetahui PLA tidak terlalu serius dalam hal tersebut, dengan cara melihat ruang lingkup, skala, serta lokasi latihan PLA. Tiongkok berulang kali menekankan bahwasanya upaya yang dilakukan merupakan bentuk agar dapat mencapai reunifikasi, walaupun kekuatan militer tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan. Tiongkok juga menambahkan kesediaan untuk reunifikasi melalui negosiasi, dalam merespon hal ini Taiwan meyakinkan bahwasanya Taiwan pada akhirnya juga menginginkan reunifikasi.⁸²

Setelah terpilihnya Chen Shui-bian, Taiwan menerbitkan pernyataan yang disebut “*One If*” dan “*Five Nos*”. Memuat pernyataan jika Partai Komunis Tiongkok tidak menggunakan kekuatan militer kepada Taiwan, maka tidak akan ada deklarasi kemerdekaan; tidak akan ada perubahan dalam “gelar nasional”; tidak ada deskripsi “negara-ke-negara dalam konstitusi”; tidak ada referendum untuk mengubah status quo; serta tidak ada penghapusan Dewan Unifikasi Nasional maupun Pedoman Unifikasi Nasional.⁸³ Sebagai respon terhadap hal ini, Tiongkok menyampaikan “*New Three Sentences of One China*”, yakni mengubah penyatuan dari karakterisasi status quo menjadi tujuan akhir yang ingin diwujudkan di masa depan, dan menyamakan status Taiwan dengan Tiongkok, serta memperlakukan keduanya sebagai “bagian” dari Tiongkok secara keseluruhan. Perubahan ini

⁸² Ibid.

⁸³ Harvey Sicherman, “Taiwan's New President: One If and Five Nos,” *Taiwan Documents Project*, June, 2022, diakses pada 10 Desember 2022. <http://www.taiwandocuments.org/fpri03.htm>

merupakan bagian terpenting dalam kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan selama era Jiang Zemin.⁸⁴

Tiongkok lebih banyak menggunakan cara-cara yang diplomatis dalam kebijakannya. Faktor yang mempengaruhi keputusan ini adalah fokusnya yang cenderung kepada mulai membangun hubungan damai serta menguntungkan, baik dalam skala regional maupun internasional.⁸⁵ Sektor yang diutamakan untuk memenuhi hal tersebut ialah ekonomi, melanjutkan kondisi ekonomi Tiongkok yang sudah banyak mengalami kemajuan semenjak masa pemerintahan Deng Xiaoping. Tiongkok berusaha untuk meningkatkan kondisi ekonomi ke titik yang aman, guna meningkatkan keamanan nasionalnya serta membangun ekonomi yang modern. Pencapaian paling penting dalam sektor ekonomi ialah dengan bergabungnya Tiongkok ke WTO. Tiongkok mendorong perusahaan-perusahaan dinegaranya untuk melakukan ekspansi ke luar negeri, serta memanfaatkan pasar global untuk melayani kebutuhan pembangunan Tiongkok. Memprioritaskan partisipasi negara dalam globalisasi serta reformasi ekonomi, menjadikan Tiongkok sebagai pabrik dunia, serta pembuka jalan bagi era keemasan Tiongkok.⁸⁶

Berbeda dengan sektor ekonomi, yang Tiongkok hanya perlu melakukan peningkatan serta pengembangan dalam skala yang lebih luas. Dalam sektor militernya, Tiongkok justru seperti memulai dari awal, mengingat sempat

⁸⁴ Kuan-Wu Chen dan Yu-Shan Wu, "Power position and Taiwan policy: how Beijing responds to Taipei's stimuli during the Jiang Zemin and Hu Jintao periods" *Journal Of Contemporary East Asia Studies*, Vol. 6, No. 2, 132–152 (2017): 142, <https://doi.org/10.1080/24761028.2017.1391620>

⁸⁵ Yoshihumi Nakai, "Chapter 3 Foreign Policy of the Post-Jiang Zemin Era," *Institute of Developing Economies (IDE-JETRO)*, (2003): 35, doi/10.20561/00045217

⁸⁶ Zongyuan Zoe Liu, "Jiang Zemin Put China's Economic Opening Into Practice," *Council on Foreign Relations*, Desember 2022, diakses pada 11 Desember 2022, <https://www.cfr.org/blog/jiang-zemin-put-chinas-economic-opening-practice>

terjadinya penurunan kualitas militer yang terjadi pada era kepemimpinan Deng Xiaoping. Pada masa kepemimpinan Jiang Zemin, Tiongkok mulai mereformasi militernya serta mulai mempersiapkan modernisasi tentaranya.⁸⁷ Upaya dalam modernisasi tersebut, salah satunya dengan mulai mengembangkan angkatan udara, yakni melalui memodernisasi pesawat dan mengirim pilot militer untuk mengikuti pelatihan dari Rusia.⁸⁸ Hal ini memengaruhi Tiongkok dalam sempat menggunakan kekuatan militernya dalam menghadapi Taiwan, namun penggunaan kekuatan militer ini tidak berlangsung lama ataupun serius, karena Tiongkok mendapat peringatan dari Amerika Serikat. Penggunaan kekuatan dalam bentuk apapun terhadap Taiwan, akan mengakibatkan konsekuensi serius, dan Tiongkok yang harus bertanggung jawab.⁸⁹

Dalam kondisi kemampuan militer Tiongkok yang jauh di bawah Amerika Serikat, tiada pilihan lain selain berhati-hati. Tiongkok memilih untuk tidak menggunakan kekuatan militer yang lebih jauh terhadap Taiwan, serta berusaha meyakinkan Amerika Serikat bahwasanya tidak ada niat dari Tiongkok untuk menyerang Taiwan. Tiongkok juga memastikan terkait dengan batas waktu, skala, serta batas latihan dalam mencoba rudalnya.⁹⁰

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Dr. Andrew Scobell, "Chinese Army Building in the Era of Jiang Zemin," US Army War College Press (2000): 5

⁸⁹ Dr Gary Klintworth, "China and Taiwan-From Flashpoint to Redefining One China," *Parliament of Australia*, November, 2000, diakses pada 11 Desember 2022, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp0001/01RP15

⁹⁰ Ibid.

3. Masa Kepemimpinan Hu Jintao

Pada awal masa kepemimpinan Hu Jintao, hubungan Tiongkok dengan Taiwan semakin membaik. Mendorong proses normalisasi melalui pertemuan dua organisasi semi-resmi lintas selat yakni SEF dan ARATS.⁹¹ Hal ini kemudian berubah, dikarenakan Taiwan mengajukan referendum terkait dengan pemberhentian Tiongkok untuk mengarahkan rudalnya ke arah Taiwan.⁹² Referendum terkait dengan negosiasi lintas selat juga diajukan, karena Taiwan ingin mendapatkan status yang lebih otonom. Status otonom tersebut diperlukan untuk dapat secara resmi bergabung dalam PBB dengan menggunakan nama “Taiwan”.⁹³

Tiongkok menentang upaya dilakukannya referendum, dikarenakan menurut Tiongkok hal ini dapat menjadi percobaan untuk pada akhirnya melakukan pemungutan suara dalam mencapai kemerdekaan Taiwan. Referendum sendiri telah lama dielu-elukan sebagai salah satu instrumen yang dapat mewujudkan kemerdekaan Taiwan.⁹⁴ Kemenangan Chen Shui-bian dalam pemilihan presiden Taiwan tahun 2004, menimbulkan kekhawatiran baru bagi Tiongkok. Dalam janji kemenangannya, Chen Shui-bien menyatakan bahwasanya akan dilakukan

⁹¹ Wu-ueh Chang and Chien-min Chao, “Managing Stability in the Taiwan Strait: Non-Military Policy towards Taiwan under Hu Jintao,” *Journal of Current Chinese Affairs* (2009): 100, ISSN: 1868-4874 (online)

⁹² VOA, “Taiwan's President Plans 'Defensive' Referendum–2003-12-06,” VOA, Oktober, 2009, diakses pada 13 Desember 2022, <https://www.voanews.com/a/a-13-a-2003-12-06-8-taiwan-s-67297862/380878.html>

⁹³ Chang Wu-ueh and Chao Chien-min, “Managing Stability in the Taiwan Strait: Non-Military Policy towards Taiwan under Hu Jintao,” *Journal of Current Chinese Affairs* (2009): 100, ISSN: 1868-4874 (online)

⁹⁴ Chen Kuan-Wu dan Wu Yu-Shan, “Power position and Taiwan policy: how Beijing responds to Taipei’s stimuli during the Jiang Zemin and Hu Jintao periods” *Journal Of Contemporary East Asia Studies*, Vol. 6, No. 2, 132–152 (2017): 140, <https://doi.org/10.1080/24761028.2017.1391620>

penulisan ulang konstitusi Taiwan. Hal ini kemudian menjadi penyebab Tiongkok menerbitkan “*Anti-Secession law*”.⁹⁵ Adapun isi dari “*Anti-Secession law* ini dianggap sebagai upaya diizinkan secara legal untuk melakukan penyerangan militer terhadap Taiwan. Amerika Serikat dengan segera mengecam usulan ini, serta meminta Tiongkok untuk memikirkan kembali rencana pemberlakuan *Anti-Secession Law*. Komandan Pasukan Pasifik Amerika Serikat, menyebut bahwasanya Undang-Undang tersebut mengganggu kestabilan hubungan, serta berpotensi terhadap keamanan regional.”⁹⁶

Pada saat Tiongkok memperingati 30 tahun “*Message to Compatriots in Taiwan*”, Hu Jintao selaku pemimpin tertinggi dari Tiongkok, menyampaikan penawaran enam proposal untuk bersama mempromosikan pengembangan unifikasi secara damai. Kesiapan Tiongkok untuk melakukan diskusi dengan Taiwan juga disampaikan dalam kesempatan ini, sehubungan dengan keanggotaan Taiwan dalam organisasi internasional, selama keanggotaan tersebut tidak akan menimbulkan “*two Chinas*” atau “*one China, one Taiwan*”. Tiongkok juga menyebutkan bahwasanya konflik harus diakhiri sesuai dengan prinsip “*One China Policy*”. Diskusi terkait dengan hubungan politik sebelum reunifikasi benar-benar dilakukan, serta perlunya berdiskusi terkait dengan mekanisme keamanan militer yang dapat dipercayai oleh kedua belah pihak sebagai upaya mencapai kestabilan hubungan. Proposal ini juga memuat permintaan kepada Taiwan untuk

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Charles Snyder, “US up in arms over ‘anti-secession’ law,” *Taipei Times*, Maret, 2005, diakses pada 13 Desember 2022, <https://www.taipetimes.com/News/front/archives/2005/03/10/2003245612>

memberhentikan upaya separatis, kemudian menyatakan bersedia untuk melanjutkan dukungan dalam segi ekonomi, budaya, dan pendidikan.⁹⁷

Kebijakan yang diterapkan oleh Tiongkok terhadap Taiwan semasa kepemimpinan Hu Jintao ini dianggap “*harder but softer*”. Dapat diartikan dengan gaya kebijakan yang diberikan terkadang bisa lebih keras jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan sebelumnya, namun di sisi lain juga menggunakan cara yang lebih lembut. Seperti setelah kunjungan mantan pemimpin Partai Nasionalis, yakni Lien Chan, Tiongkok memanasifasikan dua dimensi kebijakan. Diantaranya ialah bersekutu dengan pasukan di Taiwan untuk menggagalkan upaya kemerdekaan Taiwan, serta memberikan hak istimewa dalam ekonomi ke berbagai lapisan masyarakat Taiwan.⁹⁸

Kondisi ekonomi Tiongkok terus bertumbuh semenjak masa kepemimpinan Deng Xiaoping, yang kemudian dimanfaatkan oleh Tiongkok sebagai upaya untuk menarik minat Taiwan dalam melakukan hubungan ekonomi. Seiring dengan hal tersebut, hubungan ekonomi antara Tiongkok dengan Taiwan selalu diupayakan untuk berlanjut. Cara ini dilakukan Tiongkok untuk membuat Taiwan bergantung secara ekonomi kepada Tiongkok, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mengikat Taiwan agar tidak dapat mewujudkan

⁹⁷ Embassy Of The People's Republic Of China In The Republic Of Chile, “President Hu Offers Six Proposals For Peaceful Development Of Cross-Strait Relationship,” Embassy Of The People's Republic Of China In The Republic Of Chile, Januari, 2009, diakses pada 13 Desember 2022, http://cl.china-embassy.gov.cn/esp/jbwzlm/xw/200901/t20090103_4771699.htm

⁹⁸ Chang Wu-ueh dan Chao Chien-min, “Managing Stability in the Taiwan Strait: Non-Military Policy towards Taiwan under Hu Jintao,” *Journal of Current Chinese Affairs* (2009): 112, ISSN: 1868-4874 (online)

kemerdekaannya.⁹⁹ Setelah dilakukannya Forum Ekonomi Perdagangan antara Tiongkok dan Taiwan pada tahun 2006, Tiongkok memberlakukan izin Taiwan untuk mengekspor pertanian ke Tiongkok, memberlakukan peraturan tanpa tarif terhadap delapan belas produk pertanian Taiwan, serta memberlakukan beberapa kebijakan lainnya sehubungan dengan peningkatan hubungan ekonomi.¹⁰⁰

Pemerintahan Tiongkok menempatkan reunifikasi dengan Taiwan sebagai salah satu prioritas negara. Menurut salah satu penganalisis politik di Tiongkok, sesungguhnya Tiongkok tidak memiliki opsi selain melakukan perang, namun segala upaya untuk menghindari perang selalu dilakukan. Menurutnya, hal ini menunjukkan lemahnya pengambil keputusan, baik dari jajaran rezim, maupun para petinggi militer.¹⁰¹ Tiongkok dalam segi militernya masih dalam tahap pengembangan di segi maritim, yang diawali dengan tujuan untuk memperumit intervensi Amerika Serikat dalam upaya reunifikasi, yakni memulai kemampuan amfibi. Tiongkok juga mulai memiliki pandangan untuk memperkuat keamanan dalam segi lautnya, dengan memberikan misi khusus kepada angkatan laut. Adapun upaya lainnya yakni dengan memasang Varyag di wilayah laut Tiongkok sebagai kapal induk Tiongkok, Varyag merupakan bekas kapal induk Uni Soviet.¹⁰² Upaya memajukan bidang maritim Tiongkok ini, dinilai belum dapat melawan Amerika

⁹⁹ Ezra N. H. Chen, "The Economic Integration of Taiwan and China and Its Implications for Cross-strait Relations," Harvard University (2003): 25, <https://robobees.seas.harvard.edu/files/fellows/files/chen.pdf>

¹⁰⁰ Ibid, hlm. 113

¹⁰¹ Chunjuan Nancy Wei, "China's Anti-Secession Law and Hu Jintao's Taiwan Policy," *Journal of International Affairs* (2010): 118, https://www.researchgate.net/publication/260248596_China's_Anti-Secession_Law_and_Hu_Jintao's_Taiwan_Policy

¹⁰² Rush Doshi, "Hu's to blame for China's foreign assertiveness?," Brookings, Januari, 2022, diakses pada 15 Desember 2022, <https://www.brookings.edu/articles/hu-to-blame-for-chinas-foreign-assertiveness/>

Serikat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Tiongkok dalam segi militer tidak dapat terlalu berani.¹⁰³ Selain itu, Tiongkok tidak akan benar-benar menggunakan kekuatan militer untuk upaya reunifikasi, namun hanya untuk jika terjadinya kemerdekaan Taiwan.¹⁰⁴

C. Gaya Diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada era kepemimpinan Xi Jinping tahun 2017-2022

Kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan terhitung cukup konsisten dari tahun ke tahun semenjak era Deng Xiaoping, yang dimana mengubah gaya kebijakan sebelumnya berupa “perlawanan” menjadi “negosiasi”. Reunifikasi secara damai selalu menjadi prinsip dalam kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan semenjak era tersebut, namun penggunaan kekuatan militer masih dapat dijadikan opsi jikalau upaya upaya untuk reunifikasi secara damai tidak dapat dicapai. Pemimpin Tiongkok setelah Deng Xiaoping memiliki masing-masing kebijakannya terhadap Taiwan, namun gaya kebijakannya tidak bergeser jauh dari prinsip yang diterapkan sejak era Deng Xiaoping.¹⁰⁵ Pada masa pemerintahan Xi Jinping, Tiongkok memiliki gaya kebijakan luar negeri serta gaya diplomasi baru dan berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Gaya diplomasi ini mendapatkan popularitas dikalangan masyarakat Tiongkok yang dijuluki dengan “*Wolf Warrior*

¹⁰³ George Friedman, “Hu Jintao,” *Geopolitical Futures*, Oktober, 2022, diakses pada 15 Desember 2022, <https://geopoliticalfutures.com/hu-jintao/>

¹⁰⁴ Chunjuan Nancy Wei, “China’s Anti-Secession Law and Hu Jintao’s Taiwan Policy,” *Journal of International Affairs* (2010): 125, https://www.researchgate.net/publication/260248596_China's_AntiSecession_Law_and_Hu_Jintao's_Taiwan_Policy

¹⁰⁵ Dr. Hsiao-chuan Liao, “An Interpretation of Xi’s Taiwan Policy—and Taiwan’s Response,” *Indo-Pacific Perspective*, (2021): 25

Diplomacy". Dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh Zhiqun Zhu dengan judul "*Interpreting China's "Wolf-Warrior Diplomacy"*" dipaparkan bahwa gaya diplomasi Tiongkok di masa pemerintahan Xi Jinping bertransisi menjadi memiliki karakteristik *assertive*, *proactive*, dan *high-profile*.¹⁰⁶ *Assertive* yang dimaksud adalah ketika Tiongkok mengalami konflik dengan negara lain, ia cenderung menerapkan diplomasi yang menunjukkan kepercayaan diri dan menonjolkan kekuatannya, dengan tujuan mengalahkan lawan atau membuat lawannya merasa terintimidasi. *Proactive* yang dimaksud yakni diplomasi Tiongkok yang cenderung memilih untuk menciptakan atau mengendalikan situasi dengan melakukan sesuatu, hal ini dilakukan Tiongkok sebagai bentuk pencegahan, karena menurutnya lebih baik melakukan pencegahan, dari pada membiarkan hal yang ditakutkan terjadi dan kemudian harus memberikan tanggapan terhadap hal tersebut. *High-profile* yang dimaksud ialah diplomasi Tiongkok yang dilakukan untuk menarik banyak perhatian dan publisitas dari khalayak umum.

Peningkatan konflik Tiongkok dengan Taiwan pada era kepemimpinan Xi Jinping mulai terjadi pada saat Tsai Ing-wen terpilih menjadi presiden Taiwan. Dalam pidatonya saat memenangkan pemilihan umum di Taiwan, Tsai Ing-wen menyatakan ketersediaannya dalam mempertahankan status quo sesuai dengan kehendak dari rakyat serta tatanan konstitusional Taiwan, demi menjaga kestabilan hubungan dengan Tiongkok. Dalam beberapa wawancara Tsai Ing-wen juga menyampaikan kesediaannya untuk menghormati segala perjanjian tertulis yang

¹⁰⁶ Zhiqun Zhu, "Interpreting China's "Wolf-Warrior Diplomacy"," *Pacific Forum* (2020): 1-2

diratifikasi oleh Legislatif Yuan, melanjutkan pembicaraan dengan SEF dan ARATS serta mendorong Undang-Undang Perjanjian Pengawasan Lintas Selat, namun yang menjadi pemicu utama dalam konflik di era kepemimpinan Xi Jinping ialah penolakan terhadap “1992 Consensus” yang disampaikan oleh Tsai Ing-wen.¹⁰⁷ Pernyataan penolakan terhadap “1992 Consensus” membuat Tiongkok memiliki kecurigaan terhadap Tsai Ing-wen yang akan mendorong upaya kemerdekaan Taiwan.

Tidak lama dari pidato tersebut, Tsai Ing-wen melalui konferensi pers yang dilakukan pada akhir tahun 2016, menyebut Taiwan sebagai “negara yang berdaulat dan merdeka”.¹⁰⁸ Hal ini kemudian semakin memvalidasi prasangka Tiongkok, sehingga Tiongkok langsung menegaskan kembali kepada Taiwan bahwasanya “1992 Consensus” harus di hormati.¹⁰⁹ 1992 Consensus merupakan istilah politik dari hasil pertemuan yang dilakukan oleh perwakilan Tiongkok dengan Taiwan pada tahun 1992. Konsensus ini memuat pernyataan yang disepakati keduanya bahwasanya hanya ada satu china di dunia.¹¹⁰

Ditambah dengan hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat terlihat semakin harmonis, menimbulkan kekhawatiran lain bagi Tiongkok. Hubungan yang erat ini dianggap Tiongkok timbul dari terlalu bebasnya Taiwan dalam

¹⁰⁷ Lin Wen-cheng, “Taiwan Enters The Tsai Ing-Wen Era And The Impact On Cross-Strait Relations,” ISPI Italian Institute for International Political Study (2016): 3

¹⁰⁸ J.R. Wu, “Taiwan Says It Will Be Calm When Dealing With China, but 2017 Will Test National Security,” Washington Post, Desember, 2016, diakses pada 22 Desember 2022, https://www.washingtonpost.com/world/amid-uncertainties-2017-will-test-taiwans-national-security/2016/12/31/b99563a8-cf97-11e6-a87f-b917067331bb_story.html

¹⁰⁹ Hsiao-chuan Liao, “An Interpretation of Xi’s Taiwan Policy—and Taiwan’s Response,” Indo-Pacific Perspective, (2021): 26

¹¹⁰ Chen Yu-Jie dan Jerome A. Cohen, “China-Taiwan Relations Re-Examined: The “1992 Consensus” And Cross-Strait Agreements,” Penn Law: Legal Scholarship Repository (2019): 7

melakukan kerjasama, yang ditakutkan akan menimbulkan berbagai Ancaman bagi Tiongkok sendiri. Hubungan terlalu erat yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Taiwan, sehingga Amerika Serikat sering memosisikan dirinya sebagai negara yang melindungi Taiwan. Penjualan persenjataan Amerika Serikat kepada Taiwan juga merupakan salah satu dampak dari semakin eratnya hubungan keduanya. Terdapat pula Undang-Undang yang disepakati keduanya, berisikan komitmen dari Amerika Serikat untuk mengirimkan senjata ke Taiwan, serta rencana penjualan dengan nominal 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dukungan militer secara lengkap, seperti menjual kapal selam juga diberikan kepada Taiwan, yang membuat Tiongkok semakin khawatir dengan upaya modernisasi militer yang dilakukan oleh Taiwan ini.¹¹¹ Jika Taiwan mengalami peningkatan kemampuan militer, maka berpotensi semakin sulitnya Tiongkok dalam mempertahankan Taiwan untuk mencapai reunifikasi. Beberapa hal di atas kemudian menjadi alasan dari Tiongkok menerapkan beberapa kebijakan terhadap Taiwan yang sesuai dengan indikator *Wolf Warrior Diplomacy*.

1) Menggunakan Kekuatan Militer Terhadap Taiwan (*Assertive*)

Berdasarkan indikator *assertive, proactive, dan high-profile* milik Zhiquan Zhu dan indikator dari penerapannya terhadap negara lain, *assertive* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gaya diplomasi Tiongkok yang menggunakan *power* negaranya untuk mengintimidasi Taiwan agar mengurungkan niatnya dalam

¹¹¹ Glori K. Wadrianto, "AS Jual Senjata 1,4 Miliar Dollar AS ke Taiwan, China Protes Keras", Kompas.com, Juni, 2017, diakses pada 22 Desember 2022, <https://internasional.kompas.com/read/2017/06/30/16473421/as.jual.senjata.1.4.miliar.dollar.as.ke.taiwan.china.protes.keras>

merdeka sendiri. Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping pada tahun 2017-2022, kemudian melakukan beberapa kebijakan terhadap Taiwan yakni:

a. PLA Menetapkan 4 Strategi Militer

Beberapa perilaku Taiwan yang menimbulkan kekhawatiran tersebut, kemudian membuat Tiongkok mengupayakan beberapa kebijakan. Kebijakan yang merupakan strategi dari PLA, serta tercantum dalam CMPR tahun 2017. Kebijakan yang pertama disebut dengan *Maritime Blockade*, yang agendanya di jabarkan oleh PLA sebagai blokade, serangan rudal, dan penyitaan beberapa pulau lepas pantai yang ada. PLA menjabarkan lebih lanjut dengan akan memberikan ancaman kepada kapal yang mencoba masuk di wilayah perairan Taiwan, serta Tiongkok akan memasang kapal selam angkatan laut di wilayah perairan tersebut. Kedua, disebut dengan *Limited Force or Coercive Options*, dijabarkan oleh PLA sebagai bentuk penyerangan melalui teknologi informasi serta serangan fisik terhadap infrastruktur. Penyerangan ini ditujukan untuk menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat Taiwan terhadap pemimpinnya. Kebijakan ketiga yakni *Amphibious Invasion*, merupakan upaya untuk membangun tempat pendaratan serta menerobos pertahanan pantai. Tempat pendaratan amfibi ini akan selalu dikembangkan dan diperluas, agar dapat mengangkut lebih banyak barang dan personel PLA. Keempat, *Air and Missile Campaign* yang merupakan penyerangan rudal, rudal DF-16 telah dipersiapkan untuk dapat menyerang Taiwan bahkan dari jarak 1.000 sampai 1.500 km.¹¹²

¹¹² Inneke Firsana Dewi dan Karina Utami Dewi, "Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok," *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 7, No. 2 (2019): 165, doi: 10.18196/72136

b. Menerbangkan Jet Tempur di Atas Wilayah Taiwan

Pada tahun 2017 Tiongkok mempatrolikan pesawat pengebom, pesawat mata-mata, dan jet tempur baru di atas wilayah Taiwan.¹¹³ Sepanjang tahun 2017 tercatat sebanyak 34 pesawat milik Tiongkok memasuki wilayah udara Taiwan. Pada tahun 2018 diketahui mengalami penurunan, dengan jumlah sebanyak 13 pesawat dari Tiongkok yang diterbangkan di atas wilayah Taiwan, dengan jenis SU-35 yang merupakan pesawat tempur dengan multi peran, dan H-6K jet pengebom strategis jarak jauh.¹¹⁴ Pada tahun 2019 Tiongkok juga menerbangkan beberapa macam pesawat militer, diantaranya yakni jet tempur Sukhoi SU-30 serta pesawat pengintai Shaanxi Y-8. Pesawat-pesawat tersebut terbang mengitari Bashi Channel, yang terletak di antara Filipina dan Taiwan.¹¹⁵ Sepanjang tahun 2019, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018, yakni tercatat sejumlah 20 pesawat diterbangkan oleh Tiongkok di atas wilayah Taiwan.¹¹⁶

Pada tahun 2020, walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19, Tiongkok tidak memberhentikan upaya intimidasinya terhadap Taiwan. Hanya

¹¹³ Andrew Wong, "Beijing is upping the pressure on Taiwan: 'Expectation of reunification is certainly increasing,'" Juni, 2018, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.cnbc.com/2018/05/31/mainland-china-and-taiwan-increased-tensions-about-one-china-policy.html>

¹¹⁴ Lin Jianxun, "Táihǎi chéngměi zhōng juéli zhànchǎng 台海成美中 角力戰場 [Taiwan Strait becomes US-China battleground]," Agustus, 2020, diakses pada 7 Januari 2022, <https://news.pts.org.tw/project/china-warplane-activity/>

¹¹⁵ Nick Aspinwall, "China Flies Aircraft Close to Taiwan After Taiwan Launches Live-Fire Drills," The Diplomat, Januari, 2019, diakses pada 22 Desember 2022, <https://thediplomat.com/2019/01/china-flies-aircraft-close-to-taiwan-after-taiwan-launches-live-fire-drills/>

¹¹⁶ Lin Jianxun, "Táihǎi chéngměi zhōng juéli zhànchǎng 台海成美中 角力戰場 [Taiwan Strait becomes US-China battleground]," Agustus, 2020, diakses pada 7 Januari 2022, <https://news.pts.org.tw/project/china-warplane-activity/>

sempat berhenti karena kampanye kepresidenan Taiwan sedang berlangsung, namun dilanjutkan kembali setelah Tsai Ing-wen memenangkan kembali posisi sebagai presiden Taiwan. Terhitung pesawat tempur Tiongkok sudah sebanyak empat kali mendekati wilayah Taiwan, sebanyak tiga kali pada bulan februari, dan satu kali pada bulan maret. Taiwan menanggapi serangan ini dengan menerbangkan jet tempur dengan tujuan memantau pergerakan milik Tiongkok, serta mengeluarkan teguran. Taiwan mencatat pergerakan pesawat Tiongkok bukan hanya sekedar latihan jarak jauh, melainkan berpotensi sebagai ancaman dari Tiongkok. Penerbangan jet tempur J-11 dan pesawat KJ-500 dilakukan Tiongkok setelahnya, namun penerbangan kali ini berbeda, karena dilakukan pada malam hari, serta di wilayah dekat zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Langkah ini diartikan oleh Taiwan sebagai cara Tiongkok untuk menunjukkan kemampuan tempurnya sudah di persiapkan dengan baik.¹¹⁷ Pada bulan September 2020, seminggu sebelum kunjungan pejabat senior Amerika Serikat ke Taiwan, Tiongkok meningkatkan latihan militer selama dua hari berturut-turut dalam segi udara dan laut, di dekat wilayah Taiwan. Juru bicara dari Kementerian Pertahanan Tiongkok mengatakan bahwa hal ini merupakan respon yang tepat terhadap agenda tersebut, sebagai cara Tiongkok melindungi kedaulatan dan integritasnya.¹¹⁸ Pada tahun 2020, Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan melaporkan bahwasanya peningkatan

¹¹⁷ Feng Ziwei, "China's military poses increased threat to Taiwan," Taiwan News, Maret, 2020, diakses pada 22 Desember 2022. <https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3900337>

¹¹⁸ Euractiv, "China begins military drills as senior US official visits Taiwan," Euractiv, September, 2020, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.euractiv.com/section/china/news/china-begins-military-drills-as-senior-us-official-visits-taiwan/>

pesat terjadi, sebanyak 380 pesawat Tiongkok terbang diatas wilayah Taiwan sepanjang tahun tersebut.¹¹⁹

Pada bulan Agustus 2021, pemerintahan Joe Biden menyetujui penjualan senjata kepada Taiwan senilai 750 juta dolar Amerika Serikat. 1 Oktober, bersamaan dengan hari memperingati kemerdekaan Tiongkok, Tiongkok menerbangkan 38 pesawat militer, keesokannya sebanyak 39 pesawat militer, kemudian hari selanjutnya sebanyak 16 pesawat militer dengan jalur yang sama tiga hari berturut-turut. Pada hari keempat, menerbangkan sebanyak 52 pesawat militer. Terhitung total 145 penerbangan terjadi dalam empat hari. Adapun tipe pesawat yang digunakan oleh Tiongkok ialah jet tempur Shenyang J-16 yang merupakan jet inti dalam kekuatan militer Tiongkok, jet tempur Sukhoi SU-30, serta Xian H-6 jet untuk mengebom bermesin ganda. Shaanxi Y-8 ASW yakni pesawat pemburu kapal selam, serta Shaanxi KJ-500 pesawat yang digunakan untuk peringatan pertama turut hadir dalam penerbangan tersebut. Dalam merespon hal ini, Taiwan mengeluarkan peringatan, serta mengerahkan sistem pertahanan rudal saat mengawasi pergerakan pesawat Tiongkok.¹²⁰ Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 969 pesawat Tiongkok memasuki wilayah udara Taiwan,

¹¹⁹ Ministry Of National Defense Republic of China, "PLA Aircraft Entered Taiwan's Southwestern ADIZ," hlm. 54-58, <https://www.mnd.gov.tw/english/PublishTable.aspx?types=Military%20News%20Update&Title=News%20Channel&Page=54>

¹²⁰ Ramy Inocencio, "Taiwan "Very Concerned That China is Going to Launch A War" to Take Over, Foreign Minister Says," CBS News, Oktober 2021, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.cbsnews.com/news/taiwan-china-war-us-warning-record-number-chinese-military-flights/>

kenaikan ini lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.¹²¹

Pada bulan Mei tahun 2022, Biden dalam kesempatan konferensi pers bersama Perdana Menteri Jepang, menyampaikan bahwasanya Amerika Serikat bersedia membela Taiwan jika Tiongkok melakukan penyerangan. Amerika Serikat tetap menghormati “*One China Policy*”, yakni mengakui Tiongkok sebagai pemerintahan yang sah, namun Amerika Serikat tidak dapat membiarkan jika Taiwan diambil secara paksa melalui penggunaan kekuatan militer.¹²² Pada 25 Juli Tiongkok mendengar kabar bahwa pada tanggal 2 hingga 3 Agustus Nancy Pelosi selaku *House Speaker* dari Amerika Serikat akan mengunjungi Taiwan. Tiongkok dengan sigap memberikan peringatan kepada Amerika Serikat untuk membatalkan agenda tersebut. Tiongkok juga meminta Amerika Serikat untuk menghormati komitmennya yakni tidak membantu kemerdekaan Taiwan, serta memberikan peringatan secara tegas terkait konsekuensi penggunaan militer Tiongkok akan diterapkan jika kunjungan dilakukan.¹²³ Sejak tanggal 26 Juli Tiongkok menerbangkan jet militernya di atas wilayah Taiwan, serta mengirimkan pesawat untuk memantau situasi. Nancy Pelosi tetap mengunjungi Taiwan, memberikan

¹²¹ Ministry Of National Defense Republic of China, “PLA Aircraft Entered Taiwan’s Southwestern ADIZ,” hlm. 29-54, <https://www.mnd.gov.tw/english/PublishTable.aspx?types=Military%20News%20Update&Title=News%20Channel&Page=29>

¹²² Anthony Kuhn, “Biden says the U.S. would be willing to intervene militarily to defend Taiwan,” National Public Radio, Mei, 2022, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.npr.org/2022/05/23/1100655012/biden-says-u-s-intervene-with-military-to-defend-taiwan>

¹²³ Merdie Nzanga, “China again threatens 'consequences' if House Speaker Nancy Pelosi visits Taiwan,” *USA TODAY*, Agustus, 2022, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.usatoday.com/story/news/politics/2022/08/01/china-warning-pelosi-taiwan-visit/10199778002/>

dampak berupa Tiongkok melakukan latihan militer tembakan langsung yang selama ini belum pernah dilakukan.¹²⁴

Latihan ini dilakukan di enam wilayah yang mengelilingi Taiwan sehari setelah kunjungan tersebut, yakni pada tanggal 4 Agustus 2022. Diselenggarakan pada 0400 GMT dan akan berakhir pada 0400 GMT tanggal 7 Agustus 2022, yang dilakukan oleh Tiongkok dalam latihan ini ialah tembakan langsung di wilayah udara yang sangat berdekatan dengan Taiwan.¹²⁵ Pada tanggal 10 Agustus, bertepatan dengan beberapa jam setelah Nancy Pelosi meninggalkan Korea, terdeteksi pesawat tidak dikenal, yang dapat pula merupakan drone, memasuki wilayah udara pantai daratan Taiwan. Keesokan harinya, yakni tanggal 11 Agustus diketahui kapal Angkatan Laut serta pesawat militer melintasi wilayah Taiwan, Taiwan hingga menggunakan jet serta sistem rudalnya untuk melacak pesawat milik Tiongkok yang melintasi Taiwan.¹²⁶ Sejak bulan Januari hingga bulan Agustus tahun 2022, tercatat sebanyak 1.071 pesawat Tiongkok memasuki wilayah Taiwan. Lonjakan terjadi pada bulan Agustus sebagai bentuk tanggapan terhadap kedatangan Nancy Pelosi, yakni sebanyak 446 pesawat diterbangkan khusus di bulan tersebut.¹²⁷

¹²⁴ Aljazeera, “‘If she dares’: China warns Nancy Pelosi against visiting Taiwan,” *Aljazeera*, Agustus, 2022, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.aljazeera.com/news/2022/8/1/china-warns-pelosi-against-visiting-taiwan>

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ CNBC, “China begins live-fire military drills around Taiwan, a day after Pelosi visit,” *CNBC*, Agustus, 2022, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.cnbc.com/2022/08/04/china-begins-live-fire-military-drills-around-taiwan-a-day-after-pelosi-visit.html>

¹²⁷ Ministry Of National Defense Republic of China, “PLA Aircraft Entered Taiwan’s Southwestern ADIZ,” hlm. 1-29, <https://www.mnd.gov.tw/english/PublishTable.aspx?types=Military%20News%20Update&Title=News%20Channel&Page=1>

c. Kapal Tiongkok Memasuki Perairan Taiwan

Pada awal tahun 2019, lebih tepatnya satu minggu setelah Taiwan menggelar latihan militernya secara besar-besaran, tercatat beberapa kali kapal Angkatan Laut serta kapal penjaga pantai dari Tiongkok memasuki perairan Taiwan.¹²⁸ Latihan militer dari Taiwan tersebut, merupakan respon dari Taiwan setelah Tiongkok menyampaikan tidak akan memberhentikan penggunaan militer terhadap Taiwan. Pada bulan Juni 2019, dilanjutkan dengan Tiongkok mengirim Liaoning ke perairan Taiwan, Liaoning merupakan kapal pengangkut jet tempur.¹²⁹ Pada tahun 2020, Tiongkok memberangkatkan kapal pengawal yang memiliki dua kendali untuk merusak rudal, serta dua kapal perang Fregat untuk berlayar di wilayah Taiwan. Pada bulan Juli 2020, Tiongkok melakukan Latihan Angkatan Laut secara besar-besaran pada wilayah yang dekat sekali dengan Taiwan, sebagai respon terhadap kesepakatan Amerika Serikat dalam menjual senjata militer ke Taiwan dengan total sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat.¹³⁰

Sejak tanggal 25 Juli 2022 diketahui Tiongkok telah memerintahkan PLA untuk menempatkan kapal-kapalnya didekat wilayah Taiwan, sebagai tanggapan atas informasi kunjungan dari Nancy Pelosi ke Taiwan akan dilakukan pada tanggal 2 hingga 3 Agustus 2022.¹³¹ Pada tanggal 4 Agustus 2022, Tiongkok

¹²⁸ Reuters, "Taiwan Condemns Beijing After Chinese Jets Cross Maritime Line," Reuters, Maret, 2019, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.reuters.com/article/us-taiwan-china-idUSKCN1RC0ID>

¹²⁹ Ibid.

¹³⁰ John F Copper, "Taiwan's Politics In Action: Struggling To Win At The Ballot Box," (World Scientific Publishing Company, 2020), 139

¹³¹ Aljazeera, "'If she dares': China warns Nancy Pelosi against visiting Taiwan," Aljazeera, Agustus, 2022, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.aljazeera.com/news/2022/8/1/china-warns-pelosi-against-visiting-taiwan>

menyelenggarakan Latihan militer secara besar-besaran sebagai respon atas kedatangan Nancy Pelosi. Aksi ini dilakukan pada 0400 GMT dan akan berakhir pada 0400 GMT tanggal 7 Agustus 2022, yang dilakukan oleh Tiongkok dalam latihan ini ialah tembakan langsung di perairan yang sangat berdekatan dengan Taiwan.¹³²

Tiongkok menggunakan *power* negaranya dalam segi militer, karena secara kemampuan jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan Taiwan. Tiongkok memiliki senjata yang lebih canggih dan kuat, yang dapat dilihat dari tipe pesawat tempur serta kapal perang yang digunakan oleh Tiongkok. Hal-hal tersebut sejalan dengan karakteristik *Wolf Warrior Diplomacy* yakni *assertive*, yang diartikan dalam penelitian ini sebagai gaya diplomasi Tiongkok yang menggunakan *power* negaranya untuk mengintimidasi Taiwan agar mengurungkan niatnya dalam merdeka sendiri. Dalam menggunakan kekuatan militernya terhadap Taiwan, Tiongkok menerapkan tiga kebijakan yakni melalui PLA yang menetapkan 4 strategi militer, menerbangkan jet tempur di atas wilayah Taiwan, serta kapal Tiongkok yang memasuki perairan Taiwan.

2) Mengendalikan Pihak serta Situasi untuk Mencegah Terwujudnya Kemerdekaan Taiwan (*Proactive*)

Berdasarkan indikator *assertive*, *proactive*, dan *high-profile* milik Zhiqun Zhu dan indikator penerapannya terhadap negara lain, *proactive* yang dimaksud dalam penelitian ini, ialah gaya diplomasi Tiongkok yang mengendalikan pihak

¹³² Ibid.

serta situasi dengan tujuan mencegah terwujudnya kemerdekaan Taiwan. Mengingat Taiwan di masa kepemimpinan Tsai Ing-wen semakin gencar untuk mendapatkan rekognisi global, berusaha merdeka sendiri, serta mendorong adanya demokrasi, dianggap oleh Tiongkok sebagai ancaman dalam segi politik¹³³. Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping pada tahun 2017-2022, kemudian melakukan beberapa kebijakan terhadap Taiwan yakni:

a. Melalui Strategi Politik Front Persatuan Tiongkok

Dianggap oleh Tiongkok sebagai salah satu senjata ampuh untuk mewujudkan reunifikasi. Dalam strategi ini, Tiongkok mendukung warganya untuk merantau, fungsi dari hal ini ialah agar dapat mengembangkan komunitas para perantau asal Tiongkok serta memobilisasi mereka untuk dapat membantu mencapai kepentingan nasional. Setiap komunitas diharapkan dapat setidaknya melakukan protes untuk menolak kunjungan dari perwakilan Taiwan di negara tempat mereka merantau. Komunitas mahasiswa Tiongkok di Universitas Miami mendorong para mahasiswa lain untuk menyambut kedatangan presiden Tiongkok yakni Xi Jinping. Disaat bersamaan, para mahasiswa Tiongkok dari komunitas yang sama melawan demonstran yang mendukung Taiwan. Warga Tiongkok yang tinggal di daerah tersebut justru memberikan dukungan yang melimpah terhadap

¹³³ Inneke Firsana Dewi dan Karina Utami Dewi, "Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok," *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 7, No. 2 (2019): 165-166, doi: 10.18196/72136

aksi tersebut, seperti menawarkan dan mensubsidi transportasi, banner, dan atribut lain yang dibutuhkan.¹³⁴

b. Memberikan Ultimatum kepada Negara-negara Lain

Merupakan upaya Tiongkok dalam mempengaruhi negara-negara lain untuk membuat Taiwan tidak diterima keikutsertaannya dalam segala bentuk forum internasional, serta mencegah negara-negara lain untuk memberikan dukungan terhadap upaya Taiwan dalam mewujudkan kemerdekaannya. Pada awal tahun 2017 Taiwan ingin bergabung dalam pertemuan tahunan *World Health Assembly*.¹³⁵ Alasan di balik upaya Taiwan dalam bergabung di pertemuan tahunan *World Health Assembly* adalah karena ingin mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain terkait statusnya sebagai negara berdaulat. Tiongkok beranggapan upaya yang dilakukan oleh Taiwan ini merusak kedaulatan Tiongkok dan penghinaan terhadap “*One China Policy*”.¹³⁶ Pada konferensi pers akhir tahun 2017, Tsai Ing-wen menyatakan posisi Taiwan berada di kondisi lingkungan geopolitik yang tidak dapat di prediksi, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan aktivitas militer Tiongkok baik di udara maupun di lautan. Rencana Taiwan pada tahun 2018 adalah berkomitmen untuk menjaga kedaulatannya, menjaga stabilitas regional, serta menjaga perdamaian.¹³⁷ Nyatanya Taiwan tetap berupaya untuk mendapatkan

¹³⁴ June Teufel Dreyer, “A Weapon Without War: China’s United Front Strategy,” Foreign Policy Research Institute, Februari, 2018, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.fpri.org/article/2018/02/weapon-without-war-chinas-united-front-strategy/>

¹³⁵ Chris Horton, “Blocked by China, Taiwan Presses to Join U.N. Agency’s Meeting,” *New York Times*, Mei, 2017, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.nytimes.com/2017/05/08/world/asia/taiwan-world-health-china-.html>

¹³⁶ Kevin Ponniah, “Taiwan: How China Is Poaching The Island's Diplomatic Allies,” BBC, Juni, 2017, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.bbc.com/news/world-asia-40263581>

¹³⁷ Bryan Lynn, “China-Taiwan Relations: What to Expect in 2018,” VOA Learning English, Januari 2018, diakses pada 22 Desember 2022,

pengakuan sebagai negara, dengan demikian Tiongkok selalu menegaskan berulang-ulang kali baik kepada Taiwan, maupun negara-negara lain, terkait dengan prinsip dari “*One China Policy*” yang seharusnya di hormati. Tiongkok berhasil membuat kebanyakan negara patuh, melalui ultimatum jika suatu negara mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat, maka Tiongkok akan mempersulit hingga menolak segala pengajuan kerjasama dari negara tersebut. Dampak dari hal ini ialah Taiwan kehilangan dukungan dari El Salvador, Guatemala, dan Honduras, Kiribati, Kepulauan Solomon.¹³⁸

c. Mengendalikan Pemilihan Umum Taiwan

Pada tahun 2018 saat Taiwan menggelar pemilihan umum lokal. Diketahui terdapat beberapa intervensi yang dilakukan Tiongkok yakni melalui menyebarkan informasi palsu melalui beberapa platform sosial media seperti Facebook, Weibo, hingga aplikasi untuk mengirim pesan yang disebut dengan Line. Tiongkok menyebarkan berita palsu yang berisikan bahwa Su Chii-cherng, sebagai diplomat Taiwan di Jepang, gagal dalam membantu orang Taiwan yang terjebak pada saat topan terjadi. Berita dibagikan secara luas di Taiwan, yang mengakibatkan Su Chii-cherng melakukan bunuh diri. Su Chii-cherng meninggalkan sebuah surat yang menyatakan bahwa dia merasa terganggu dengan unggahan tersebar luas

<https://learningenglish.voanews.com/a/china-taiwan-relations-what-to-expect-in-2018/4191171.html>

¹³⁸ Inneke Firsana Dewi dan Karina Utami Dewi, “Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok,” *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 7, No. 2 (2019): 166, doi: 10.18196/72136

tersebut.¹³⁹ Pemilihan umum lokal ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pemilihan presiden pada tahun 2020. Tiongkok melakukan gangguan agar kepercayaan masyarakat menurun dan mengakibatkan tidak banyak kandidat dari DPP yang mendapatkan kursi dalam pemilihan lokal tersebut. Tujuan besar dari hal ini adalah mencegah Tsai Ing-Wen untuk menjadi presiden di periode selanjutnya yakni pada pemilihan presiden tahun 2020.¹⁴⁰

Melalui strategi politik Front Persatuan Tiongkok serta memberikan ultimatum kepada negara-negara lain, Tiongkok berupaya mengendalikan pihak lain agar tidak memberikan pengakuan terhadap Taiwan sebagai negara berdaulat. Sedangkan, melalui mengendalikan pemilihan umum Taiwan mencerminkan bahwasanya Tiongkok berusaha mengendalikan situasi, yakni melalui upaya mencegah Tsai Ing-Wen untuk menjadi presiden di periode pemilihan presiden tahun 2020. Mengingat menurut Tiongkok kepemimpinan Tsai Ing-wen lah yang membuat ambisi Taiwan untuk merdeka sendiri semakin gencar, maka dari itu Tiongkok berusaha untuk menutup jalan Tsai Ing-wen mendapatkan kursi presiden untuk kedua kalinya. Hal tersebut mencerminkan karakteristik *Wolf Warrior Diplomacy* yakni *proactive*, yang diartikan dalam penelitian ini sebagai gaya diplomasi Tiongkok yang mengendalikan pihak serta situasi dengan tujuan mencegah terwujudnya kemerdekaan Taiwan.

¹³⁹ Joshua Kurlantzick, "How China Is Interfering in Taiwan's Election," Council on Foreign Relations, November, 2019, di akses pada 23 Desember 2022, <https://www.cfr.org/in-brief/how-china-interfering-taiwans-election>

¹⁴⁰ Suci Sekarwati, "Masyarakat Taiwan Laksanakan Pemilu Lokal, Cina Pantau Ketat," Tempo, November 24, 2018, diakses pada 23 Desember 2022, <https://dunia.tempo.co/read/1149225/masyarakat-taiwan-laksanakan-pemilu-lokal-cina-pantau-ketat>

3) Diplomasi Tiongkok Melalui Sosial Media (*High-profile*)

Berdasarkan indikator *assertive*, *proactive*, dan *high-profile* milik Zhiqun Zhu dan indikator penerapannya terhadap negara lain, *high-profile* yang dimaksud dalam penelitian ini ialah gaya diplomasi Tiongkok melalui sosial media, yang mendapat banyak perhatian dan tanggapan dari masyarakat secara luas. Tiongkok menggunakan media sosial Twitter sebagai sarana untuk mendapatkan perhatian publik secara mudah. Pada awalnya, akun-akun dari para diplomat Tiongkok tidak begitu populer, namun sekitar 170 akun dari para diplomat Tiongkok mengalami peningkatan popularitas dan jumlah pengikut. Tiongkok memberikan kebebasan para diplomatnya untuk mencoba berbagai cara dalam mendapat perhatian publik. Awalnya menggunakan cara-cara seperti menggunakan konten yang sedang *viral*, hingga menggunakan video panda. Seiring berjalannya waktu terjadi perubahan cara, akun-akun para diplomat Tiongkok tersebut lebih sering digunakan untuk membalas langsung *tweet* yang menyudutkan Tiongkok, bahkan menulis *tweet* yang menarik perhatian publik sehubungan dengan kepentingan Tiongkok. Justru semenjak perubahan cara ini diketahui para diplomat Tiongkok dapat melipat gandakan jumlah pengikutnya di Twitter.¹⁴¹ Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping pada tahun 2017-2022, kemudian melakukan beberapa kebijakan terhadap Taiwan yakni:

¹⁴¹ Jessica Brandt dan Bret Schafer, "How China's 'wolf warrior' diplomats use and abuse Twitter," BROOKINGS, Oktober 2020, diakses pada 23 Desember 2022, <https://www.brookings.edu/techstream/how-chinas-wolf-warrior-diplomats-use-and-abuse-twitter/>

a. Tiongkok Merespon Upaya Bergabungnya Taiwan Dalam PBB

Tiongkok menjadi sangat berani dalam merespon hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan negaranya, bahkan hingga menggunakan pemilihan kata yang dinilai publik sangat tidak diplomatis. Saat terjadinya pandemi COVID-19, PBB bekerjasama dengan 193 negara anggotanya untuk berupaya mengatasi virus ini, sekaligus mendorong keanggotaan Taiwan agar dapat bergabung dalam upaya tersebut. Menurut Amerika Serikat, upaya pengecualian Taiwan dalam upaya tersebut merupakan aksi penghinaan terhadap prinsip PBB. Melalui cuitan yang berbunyi "*Barring #Taiwan from setting foot on UN grounds is an affront not just to the proud Taiwanese people, but to UN principles*", Tiongkok membalas cuitan ini secara lugas, yang berbunyi "*Taiwan is an inalienable part of China*". Tiongkok mengutuk cuitan tersebut karena beranggapan bahwa Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok sehingga tidak perlu bergabung dalam PBB, selain itu mengizinkan Taiwan bergabung sama saja mendukung aksi separatistis dan mengkhianati prinsip dari "*One China Policy*".¹⁴²

b. Tiongkok Merespon Kedatangan Nancy Pelosi

Kedatangan Nancy Pelosi ke Taiwan merupakan momentum puncak dari memburuknya kondisi hubungan lintas selat. Hua Chunying selaku Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, membuat delapan cuitan sebagai bentuk penolakan kuat terhadap Amerika Serikat yang menyebut Tiongkok

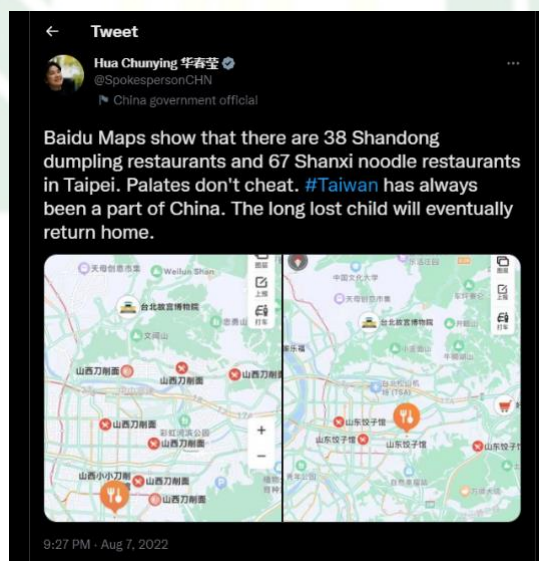
¹⁴² AFP, "China condemns US tweet on Taiwan exclusion from UN" Hongkong Free Press, Mei, 2020, diakses pada 24 Desember 2022, <https://hongkongfp.com/2020/05/03/china-condemns-us-tweet-on-taiwan-exclusion-from-un/>

“overreacting”. Amerika Serikat menyebutkan bahwasanya kedatangan Nancy Pelosi merupakan kunjungan untuk dilakukannya pembicaraan secara damai, sehingga tidak perlu bagi Tiongkok untuk melakukan kebijakan militer yang membahayakan. Dilanjutkan dengan kalimat yang berbunyi bahwasanya dunia harus meminta pertanggung jawaban Tiongkok untuk menjaga perdamaian. Hua Chunying menanggapi hal ini dengan cuitan bahwa Amerika Serikat bukan perwakilan seluruh dunia, serta seharusnya Amerika Serikat tidak terkejut atas tanggapan Tiongkok dikarenakan peringatan sudah diberikan. Hua Chunying menyebut komitmen hubungan tidak resmi yang dimiliki Amerika Serikat dengan Taiwan merupakan suatu kebohongan, serta kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan tidak mungkin sebagai “kunjungan tidak resmi”, melalui cuitannya Hua Chunying menulis *“Could a visit by the No. 3 figure of the US government on a military aircraft escorted by naval vessels be described as 'unofficial'?”*. Hua Chunying menambahkan dalam cuitannya, bahwa sebaik-baiknya cara adalah dengan kembali menghormati prinsip *“One China Policy”*. Terakhir pada hari tersebut, Hua Chunying mem-posting ulang cuitan dari seorang pengamat hubungan internasional, yang berbunyi *“the G7 is acting like a thief crying “stop thief”, while China has the backing of over 160 countries for its righteous cause”*.¹⁴³

¹⁴³ Global Times, “You are wrong’, Chinese FM spokesperson posts 8 tweets in a row rebuking US claims of China’s ‘overreaction’ to Pelosi’s Taiwan visit,” Global Times, Agustus 2022, diakses pada 23 Desember 2022, <https://www.globaltimes.cn/page/202208/1272429.shtml>

c. Tiongkok Menegaskan Klaim atas Taiwan

Hua Chunying selaku Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menggunakan daftar restoran untuk menegaskan klaimnya atas Taiwan, melalui cuitan yang berbunyi *“Baidu Maps show that there are 38 Shandong dumpling restaurants and 67 Shanxi noodle restaurants in Taipei”*. Tiongkok menambahkan *“Palates don’t cheat. #Taiwan has always been a part of China. The long lost child will eventually return home”*. Cuitan ini dibuat sebagai kelanjutan dari kemarahan Tiongkok pasca kedatangan Nancy Pelosi ke Taiwan, cuitan ini kemudian ramai di balas oleh para pengguna Twitter yang merasa logika dari Tiongkok tersebut tidak tepat.



Gambar 4.4 Tweet asli Hua Chunying

(https://twitter.com/SpokespersonCHN/status/1556285939429023744?s=20&t=xgaHIUh_2EpAao)

DOERpNsA)

Kebijakan diplomasi Tiongkok melalui sosial media ini mencerminkan salah satu karakteristik *Wolf Warrior Diplomacy*, yakni *high-profile*. Diartikan dalam penelitian ini sebagai gaya diplomasi Tiongkok melalui sosial media, yang mendapat banyak perhatian dan tanggapan dari masyarakat secara luas. Tercermin dari respon Tiongkok terhadap upaya bergabungnya Taiwan ke dalam PBB, respon Tiongkok atas kedatangan Nancy Pelosi, serta klaim atas Taiwan. Hua Chunying selaku Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dan juga beberapa diplomat Tiongkok dapat mempengaruhi sudut pandang dan memancing interaksi dari publik secara luas. Terbukti cuitan Huan Chunying tidak hanya dibalas oleh warga Tiongkok atau Taiwan yang memiliki hubungan dalam cuitan yang dilontarkan, melainkan masyarakat yang lebih luas.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Melalui analisa dan pemaparan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwasanya gaya diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada era kepemimpinan Xi Jinping tahun 2017-2022 mencerminkan karakteristik dari *Wolf Warrior Diplomacy* yakni *assertive*, *proactive*, dan *high-profile*. *Assertive* adalah gaya diplomasi Tiongkok yang menggunakan *power* negaranya, *proactive* yang dimaksud ialah gaya diplomasi Tiongkok yang mengendalikan pihak serta situasi dengan tujuan pencegahan, dan *high-profile* ialah gaya diplomasi melalui sosial media yang mendapat banyak perhatian dan tanggapan dari masyarakat secara luas, dengan tujuan menggiring opini masyarakat.

Melalui indikator tersebut, ditemukan gaya diplomasi Tiongkok terhadap Taiwan pada era kepemimpinan Xi Jinping tahun 2017-2022 ialah Tiongkok menggunakan *power* negaranya dalam segi militer terhadap Taiwan sebagai bentuk dari *assertive*. Diketahui Tiongkok menerapkan tiga kebijakan yakni melalui PLA yang menetapkan 4 strategi militer, menerbangkan jet tempur di atas wilayah Taiwan, serta kapal Tiongkok yang memasuki perairan Taiwan.

Tiongkok menerapkan upaya mengendalikan pihak serta situasi untuk mencegah terwujudnya kemerdekaan Taiwan, sebagai bentuk dari *proactive*. melalui strategi politik Front Persatuan Tiongkok serta memberikan ultimatum kepada negara-negara lain, Tiongkok berupaya mengendalikan pihak lain agar tidak

memberikan pengakuan terhadap Taiwan sebagai negara berdaulat. Sedangkan, melalui mengendalikan pemilihan umum Taiwan mencerminkan bahwasanya Tiongkok berusaha mengendalikan situasi, yakni melalui upaya mencegah Tsai Ing-Wen untuk menjadi presiden di periode pemilihan presiden tahun 2020. Mengingat menurut Tiongkok kepemimpinan Tsai Ing-wen lah yang membuat ambisi Taiwan untuk merdeka sendiri semakin gencar, maka dari itu Tiongkok berusaha untuk menutup jalan Tsai Ing-wen mendapatkan kursi presiden untuk kedua kalinya.

Tiongkok menerapkan diplomasi melalui sosial media sebagai bentuk dari *high-profile*. Tercermin dari respon Tiongkok terhadap upaya bergabungnya Taiwan ke dalam PBB, respon Tiongkok atas kedatangan Nancy Pelosi, serta klaim atas Taiwan. Hua Chunying selaku Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok dapat mempengaruhi sudut pandang dan memancing interaksi dari publik secara luas. Terbukti cuitan Huan Chunying tidak hanya dibalas oleh warga Tiongkok atau Taiwan yang memiliki hubungan dalam cuitan yang dilontarkan, melainkan masyarakat yang lebih luas.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan kepada Tiongkok serta Taiwan setelah dilakukannya penelitian ini, yakni peneliti berharap kedua pihak untuk dapat menyepakati kebijakan preferensial bagi keduanya. Selain itu melakukan perundingan untuk mendorong peningkatan kerjasama lintas selat dalam segala bidang seperti ekonomi dan akademis agar membantu menciptakan hubungan yang

lebih harmonis antara keduanya. Melalui peningkatan kerjasama diharapkan kestabilan hubungan dapat terbentuk serta dapat menciptakan kesejahteraan bersama, sehingga reunifikasi dapat segera dicapai.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 3-4

Martin, Peter. *China's Civilian Army : The Making of Wolf Warrior Diplomacy* (New York, NY : Oxford University Press, 2021), 235

Mas' oed, Mohtar Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta: LP3ES, 1990), 40

Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I, *Metodologi Penelitian* (Kalimantan: Antasari Press, 2011), 85-87

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook.* sage, (1994)

Ritchie, Jane, dkk. *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers* (SAGE Publications Ltd, 2013), 5

Vogel, Ezra F. *Deng Xiaoping and the Transformation of China* (Cambridge: The Belknap Press Of Harvard University Press, 2011), 408

ARTIKEL JURNAL

Albert, Eleanor "China-Taiwan Relation," *Council on Foreign Relations* (2016): 2-5

Astuti, Wiwiek Rukmi Dwi, dkk “China’s Wolf Warrior Diplomacy On Social Media In The Era Of Covid-19,” *Mandala Jurnal Hubungan Internasional* Vol.4 No.2 Juli-Desember (2021): 121-122

Brugier, Camille ““Wolf Warrior” Diplomacy: A New Policy To Legitimize The Chinese Communist Party,” *Institute for Strategic Research (IRSEM)* (2021) : 1-10

Chen, Ezra N. H. “The Economic Integration of Taiwan and China and Its Implications for Cross-strait Relations,” Harvard University (2003): 25, <https://robobees.seas.harvard.edu/files/fellows/files/chen.pdf>

Chen, Kuan-Wu dan Yu-Shan Wu, “Power position and Taiwan policy: how Beijing responds to Taipei’s stimuli during the Jiang Zemin and Hu Jintao periods” *Journal Of Contemporary East Asia Studies*, Vol. 6, No. 2, 132–152 (2017): 142, <https://doi.org/10.1080/24761028.2017.1391620>

Cheng, Dean “Challenging China’s “Wolf Warrior” Diplomats,” *Asian Studies Center* (2020) : 1-5

Constitutional Rights Foundation, “The Chinese Civil War: Why Did The Communists Win?” Constitutional Rights Foundation Volume 29 No.4 (2014) : 2

Copper, John F. “Taiwan's Politics In Action: Struggling To Win At The Ballot Box,” (World Scientific Publishing Company, 2020), 139

- Cucchisi, Jennifer Lynn "The Causes and Effects of the Chinese Civil War, 1927-1949," Seton Hall University Dissertations and Theses (2002): 19
- Dai, Yayao dan Luwei Luqiu, "Wolf Warriors and Xi Jinping's Diplomacy: An Empirical Analysis of China's Diplomatic Language," *Research Gate* (2021): 1-24
- Dewi, Inneke Firsana, dan Karina Utami Dewi. "Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok." *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 7, No. 2 (2019): 162-168, doi: 10.18196/72136
- Hidayat, Sinta Dewi Farida, "Hubungan Tiongkok – Taiwan Pasca Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) 2010 – 2018," *Universitas Komputer Indonesia* (2018): 8-10
- Huwaidin, Mohamed Bin dan Osman Antwi-Boateng, "The Rise of China as a Hegemonic Power: The Case for a Partial Peaceful Rise," *Journal of Regional Security* (2021) 7, doi: 10.5937/jrs0 31562
- Koopman, K. Y. "Taiwan's Path To Independence: Resolving The "One China" Dispute." *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 18 (2016): 221-248.
https://static1.squarespace.com/static/60a5863870f56068b0f097cd/t/60a5eff64444ce2a8b33bd9e/1621487606169/CAC107_crop.pdf

Kuan-Wu, Chen dan Wu Yu-Shan. "Power position and Taiwan policy: how Beijing responds to Taipei's stimuli during the Jiang Zemin and Hu Jintao periods" *Journal Of Contemporary East Asia Studies*, Vol. 6, No. 2, 132–152 (2017): 140, <https://doi.org/10.1080/24761028.2017.1391620>

Lawrence, Susan V. dan Michael F. Martin, "Understanding China's Political System," Congressional Research Service (2013): 6-7

Liao, Dr. Hsiao-chuan. "An Interpretation of Xi's Taiwan Policy—and Taiwan's Response," *Indo-Pacific Perspective*, (2021): 25

Nagy, Stephen R dan Hanh Nguyen, "Cowboy Diplomacy Meets Wolf Warrior Diplomacy: All Politics are Local" *Canadian Global Affairs Institute* (2020): 1-3

Nakai, Yoshihumi "Chapter 3 Foreign Policy of the Post-Jiang Zemin Era," *Institute of Developing Economies (IDE-JETRO)*, (2003): 35, [doi/10.20561/00045217](https://doi.org/10.20561/00045217)

Nufus, Hayati, dkk. "Diplomasi Wolf Warrior Cina dan Relasi Cina-Australia di Masa Pandemi COVID-19" *Intermestic: Journal of International Studies* Volume 6 No. 2 (2022): 366, eISSN.2503 443X

Scobell, Andrew "Chinese Army Building in the Era of Jiang Zemin," US Army War College Press (2000): 5

Vazquez, Benjamin. "China's "Wolf Warrior" Diplomacy: A New Kind of American Exceptionalism?," *Toor Cummings Center for International Studies and the Liberal Arts (CISLA)* (2022): 14

Wei, Chunjuan Nancy. "China's Anti-Secession Law and Hu Jintao's Taiwan Policy," *Journal of International Affairs* (2010): 118, https://www.researchgate.net/publication/260248596_China's_AntiSecession_Law_and_Hu_Jintao's_Taiwan_Policy

Wen-cheng, Lin. "Taiwan Enters The Tsai Ing-Wen Era And The Impact On Cross-Strait Relations," *ISPI Italian Institute for International Political Study* (2016): 3

Wijaya, Deni Adi, dkk. "Konflik Perebutan Kekuasaan Antara Kaum Nasionalis Dan Komunis Di Republik Tiongkok Tahun 1912-1949," *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember (UNEJ)* (2015): 11

Wu-ueh, Chang and Chao Chien-min, "Managing Stability in the Taiwan Strait: Non-Military Policy towards Taiwan under Hu Jintao," *Journal of Current Chinese Affairs* (2009): 100, ISSN: 1868-4874 (online)

Yu-Jie, Chen dan Jerome A. Cohen, "China-Taiwan Relations Re-Examined: The "1992 Consensus" And Cross-Strait Agreements," *Penn Law: Legal Scholarship Repository* (2019): 7

Zhu, Zhiqun. "Interpreting China's "Wolf-Warrior Diplomacy"." *Pacific Forum* (2020): 1-2

DISERTASI, THESIS, SKRIPSI

Douglas, Dan. "Mao Zedong and Xi Jinping: A Trait Analysis." Master diss., Wright State University, 2017

Sherridan, Ian “Hubungan Taiwan dan China Dalam Status Kedaulatan Taiwan”

(S-1 diss., Universitas Sumatra Utara, 2018)

Li, Tian. “The Future Relationships Between Mainland China and Taiwan” (Masters

Theses., Eastern Illinois University, 1998).

Wulandari, Putri Anastasya “Kemerdekaan Taiwan Pada Masa Presiden Hu Jintao

(2003- 2013)” (S-1 diss., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2016)

WEBSITE

AFP, “China condemns US tweet on Taiwan exclusion from UN” Hongkong Free

Press, Mei, 2020, diakses pada 24 Desember 2022,

<https://hongkongfp.com/2020/05/03/china-condemns-us-tweet-on-taiwan-exclusion-from-un/>

Aljazeera, “‘If she dares’: China warns Nancy Pelosi against visiting Taiwan,”

Aljazeera, Agustus, 2022, diakses pada 22 Desember 2022,

<https://www.aljazeera.com/news/2022/8/1/china-warns-pelosi-against-visiting-taiwan>

Aspinwall, Nick “China Flies Aircraft Close to Taiwan After Taiwan Launches

Live-Fire Drills,” *The Diplomat*, Januari, 2019, diakses pada 22 Desember

2022, <https://thediplomat.com/2019/01/china-flies-aircraft-close-to-taiwan-after-taiwan-launches-live-fire-drills/>

Bandurski, David. "Xi Jinping: Leader of the Wolf Pack," *Global Asia*, September, 2020, diakses pada 21 Maret 2022, https://www.globalasia.org/v15no3/focus/xi-jinping-leader-of-the-wolf-pack_david-bandurski

BBC News. "What is the 'One China' policy?." *BBC News*, Oktober 6, 2021. Diakses pada 26 Januari 2022. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-38285354>.

Blaauw, Erwin. "The driving forces behind China's foreign policy - has China become more assertive?," RaboResearch – Economic Research, Oktober, 2013, diakses pada 21 Maret 2022, <https://economics.rabobank.com/publications/2013/october/the-driving-forces-behind-chinas-foreign-policy-has-china-become-more-assertive/>

Brandt, Jessica dan Bret Schafer, "How China's 'wolf warrior' diplomats use and abuse Twitter," BROOKINGS, Oktober 2020, diakses pada 23 Desember 2022, <https://www.brookings.edu/techstream/how-chinas-wolf-warrior-diplomats-use-and-abuse-twitter/>

Britannica, "First Sino-Japanese War," *Encyclopedia Britannica*, July, 2022, diakses pada 4 Oktober 2022, <https://www.britannica.com/event/First-Sino-Japanese-War-1894-1895>

Britannica, "Chinese Civil War", diakses pada 14 November 2022, <https://www.britannica.com/event/Chinese-Civil-War>

Carter, James “The Last Meeting of Mao Zedong and Chiang Kai-shek,” The China Project, Agustus, 2022, diakses pada 28 Desember 2022, <https://thechinaproject.com/2021/08/25/the-last-meeting-of-mao-zedong-and-chiang-kai-shek/>

China Daily, “Jan 30,1995: President Jiang Zemin puts forward eight propositions on development of relations between two sides of Taiwan Straits,” China Daily, Januari, 2011, diakses pada 9 Desember 2022, https://www.chinadaily.com.cn/china/19thcpcnationalcongress/2011-01/30/content_29715090.htm

CNBC, “China begins live-fire military drills around Taiwan, a day after Pelosi visit,” CNBC, Agustus, 2022, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.cnbc.com/2022/08/04/china-begins-live-fire-military-drills-around-taiwan-a-day-after-pelosi-visit.html>

Consulate-General of People’s Republic of China in Chicago “President Hu Jintao offers 6 proposals for peaceful development of cross-strait relationship”, Consulate-General of People’s Republic of China in Chicago, Desember 31,2008, diakses pada 27 Agustus 2022, http://chicago.chinaconsulate.gov.cn/eng/zt/taiwanissue/200812/t20081231_5424930.htm

Doshi, Rush. “Hu’s to blame for China’s foreign assertiveness?,” Brookings, Januari, 2022, diakses pada 15 Desember 2022,

<https://www.brookings.edu/articles/has-to-blame-for-chinas-foreign-assertiveness/>

Diaoyu Dao, “Diaoyu Dao: The Inherent Territory of China” *Diaoyu Dao*, 2014, diakses pada 7 November 2022 http://www.diaoyudao.org.cn/en/2015-01/25/content_34649421.htm

Dreyer, June Teufel. “A Weapon Without War: China’s United Front Strategy,” Foreign Policy Research Institute, Februari, 2018, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.fpri.org/article/2018/02/weapon-without-war-chinas-united-front-strategy/>

Embassy Of The People's Republic Of China In The Republic Of Chile “President Hu Offers Six Proposals For Peaceful Development Of Cross-Strait Relationship,” Embassy Of The People's Republic Of China In The Republic Of Chile, Januari, 2009, diakses pada 13 Desember 2022, http://cl.chinaembassy.gov.cn/esp/jbwzlm/xw/200901/t20090103_4771699.htm

Embassy of the People’s Republic of China in the United States of America. “The 8-Point Proposition Made by President Jiang Zemin on China's Reunification”, Embassy of the People’s Republic of China in the United States of America, diakses pada 27 Agustus 2022, <https://www.mfa.gov.cn/ce/ceus/eng/zt/999999999/t36736.htm>

Euractiv, “China begins military drills as senior US official visits Taiwan,” Euractiv, September, 2020, diakses pada 22 Desember 2022,

<https://www.euractiv.com/section/china/news/china-begins-military-drills-as-senior-us-official-visits-taiwan/>

European Parliament. "Full Text of Anti-Secession Law," *European Parliament*, Diadopsi dari Sidang Ketiga Kongres Rakyat Nasional Kesepuluh pada 14 Maret 2005, diakses pada 13 Desember 2022, https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/d-cn2005042601/d-cn2005042601en.pdf

Friedman, George. "Hu Jintao," *Geopolitical Futures*, Oktober, 2022, diakses pada 15 Desember 2022, <https://geopoliticalfutures.com/hu-jintao/>

Global Times, "'You are wrong', Chinese FM spokesperson posts 8 tweets in a row rebuking US claims of China's 'overreaction' to Pelosi's Taiwan visit," *Global Times*, Agustus 2022, diakses pada 23 Desember 2022, <https://www.globaltimes.cn/page/202208/1272429.shtml>

Horton, Chris. "Blocked by China, Taiwan Presses to Join U.N. Agency's Meeting," *New York Times*, Mei, 2017, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.nytimes.com/2017/05/08/world/asia/taiwan-world-health-china-.html>

Inocencio, Ramy. "Taiwan "Very Concerned That China is Going to Launch A War" to Take Over, Foreign Minister Says," *CBS News*, Oktober 2021, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.cbsnews.com/news/taiwan-china-war-us-warning-record-number-chinese-military-flights/>

Kuhn, Anthony. "Biden says the U.S. would be willing to intervene militarily to defend Taiwan," National Public Radio, Mei, 2022, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.npr.org/2022/05/23/1100655012/biden-says-u-s-intervene-with-military-to-defend-taiwan>

Klintworth, Dr Gary "China and Taiwan-From Flashpoint to Redefining One China," Parliament of Australia, November, 2000, diakses pada 9 Desember 2022, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp0001/01RP15

Kurlantzick, Joshua. "How China Is Interfering in Taiwan's Election," Council on Foreign Relations, November, 2019, di akses pada 23 Desember 2022, <https://www.cfr.org/in-brief/how-china-interfering-taiwans-election>

Liu, Zongyuan Zoe "Jiang Zemin Put China's Economic Opening Into Practice," *Council on Foreign Relations*, Desember 2022, diakses pada 11 Desember 2022, <https://www.cfr.org/blog/jiang-zemin-put-chinas-economic-opening-practice>

Lynn, Bryan. "China-Taiwan Relations: What to Expect in 2018," VOA Learning English, Januari 2018, diakses pada 22 Desember 2022, <https://learningenglish.voanews.com/a/china-taiwan-relations-what-to-expect-in-2018/4191171.html>

Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China "A policy of "one country, two systems" on Taiwan," Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China, diakses pada 2 Desember 2022,

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/200011/t20001117_697847.html

Nawrotkiewicz, Joanna. "Understanding Chinese "Wolf Warrior Diplomacy"." *The National Bureau of Asian Research*, Oktober 22, 2021. Diakses pada 20 Februari 2022, <https://www.nbr.org/publication/understanding-chinese-wolf-warrior-diplomacy/>

Nzanga, Merdie. "China again threatens 'consequences' if House Speaker Nancy Pelosi visits Taiwan," *USA TODAY*, Agustus, 2022, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.usatoday.com/story/news/politics/2022/08/01/china-warning-pelosi-taiwan-visit/10199778002/>

Office of the Historian, Foreign Service Institute United States Department of State "Foreign Relations Of The United States: Diplomatic Papers, The Conference Of Berlin (The Potsdam Conference), 1945, Volume II," Office of the Historian, Foreign Service Institute United States Department of State, diakses pada 29 Desember 2022, <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945Berlinv02/d1382>

Ponniah, Kevin. "Taiwan: How China Is Poaching The Island's Diplomatic Allies," *BBC*, Juni, 2017, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.bbc.com/news/world-asia-40263581>

Reuters, "Taiwan Condemns Beijing After Chinese Jets Cross Maritime Line,"

Reuters, Maret, 2019, diakses pada 22 Desember 2022,

<https://www.reuters.com/article/us-taiwan-china-idUSKCN1RC0ID>

Sekarwati, Suci. "Masyarakat Taiwan Laksanakan Pemilu Lokal, Cina Pantau

Ketat," *Tempo*, November 24, 2018, diakses pada 23 Desember 2022,

<https://dunia.tempo.co/read/1149225/masyarakat-taiwan-laksanakan-pemilu-lokal-cina-pantau-ketat>

Shattuck, Thomas J. "A New Type of Diplomacy: Taiwan 50 Years after UN

Expulsion," *Foreign Policy Research Institute*, October, 2021, diakses pada

22 November 2022, [https://www.fpri.org/article/2021/10/a-new-type-of-](https://www.fpri.org/article/2021/10/a-new-type-of-diplomacy-taiwan-50-years-after-un-expulsion/)

[diplomacy-taiwan-50-years-after-un-expulsion/](https://www.fpri.org/article/2021/10/a-new-type-of-diplomacy-taiwan-50-years-after-un-expulsion/)

Sicherman, Harvey "Taiwan's New President: One If and Five Nos," Taiwan

Documents Project, June, 2022, diakses pada 10 Desember 2022.

<http://www.taiwandocuments.org/fpri03.htm>

Snyder, Charles. "US up in arms over 'anti-secession' law," *Taipei Times*, Maret,

2005, diakses pada 13 Desember 2022,

<https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2005/03/10/20032456>

[12](#)

Smith, Z. M. "New Tail for China's 'Wolf Warrior' Diplomats." *CSIS (Center for*

Strategic and International Studies), Oktober 13, 2021. Diakses pada 20

Februari 2022. [https://www.csis.org/analysis/new-tail-chinas-wolf-warrior-](https://www.csis.org/analysis/new-tail-chinas-wolf-warrior-diplomats)

[diplomats.](https://www.csis.org/analysis/new-tail-chinas-wolf-warrior-diplomats)

Syed, Abdul Rasool. "Wolf warriors: A brand new force of Chinese diplomats," *Modern Diplomacy*, July, 2020, diakses pada 21 Maret 2022, <https://moderndiplomacy.eu/2020/07/14/wolf-warriors-a-brand-new-force-of-chinese-diplomats/>

The Jakarta Post, "Timeline Of China-Taiwan Relations Leading To Historic Meet" The Jakarta Post, November, 2015, diakses pada 2 Desember 2022, <https://www.thejakartapost.com/news/2015/11/06/timeline-china-taiwan-relations-leading-historic-meet.html>

UN Research, "Founding Member States," *UN Research*, diakses pada 22 November 2022, <https://research.un.org/en/unmembers/founders>

USC University of Southern California, "Treaty Of Shimonoseki, 1895," USC University of Southern California, diakses pada 4 Oktober 2022, <https://china.usc.edu/treaty-shimonoseki-1895>

U.S Departement of State "The Cairo Conference, 1943," U.S Departement of State, diakses pada 26 Januari 2022, <https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/wwii/107184.htm>.

VOA, "Taiwan's President Plans 'Defensive' Referendum–2003-12-06," VOA, Oktober, 2009, diakses pada 13 Desember 2022, <https://www.voanews.com/a/a-13-a-2003-12-06-8-taiwan-s-67297862/380878.html>

Wadrianto, Glori K. "AS Jual Senjata 1,4 Miliar Dollar AS ke Taiwan, China Protes Keras", Kompas.com, Juni, 2017, diakses pada 22 Desember 2022,

<https://internasional.kompas.com/read/2017/06/30/16473421/as.jual.senjata.1.4.miliar.dollar.as.ke.taiwan.china.protes.keras>

Wilson, Jeffrey “What Decoupling From China Looks Like,” *Foreign Policy*, November 9, 2021, diakses pada 20 Februari 2022, <https://foreignpolicy.com/2021/11/09/australia-china-decoupling-trade-sanctions-coronavirus-geopolitics/>

Winkler, Sigrid “Taiwan’s UN Dilemma: To Be or Not To Be,” *The Brookings Institution*, June, 2012, diakses pada 22 November 2022, <https://www.brookings.edu/opinions/taiwans-un-dilemma-to-be-or-not-to-be/>

Wong, Andrew. “Beijing is upping the pressure on Taiwan: ‘Expectation of reunification is certainly increasing’,” Juni, 2018, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.cnbc.com/2018/05/31/mainland-china-and-taiwan-increased-tensions-about-one-china-policy.html>

Wong, Brian. “How Chinese Nationalism Is Changing,” *The Diplomat*, May, 2020, diakses pada 21 Maret 2022, <https://thediplomat.com/2020/05/how-chinese-nationalism-is-changing/>

Wu, J.R. “Taiwan Says It Will Be Calm When Dealing With China, but 2017 Will Test National Security,” *Washington Post*, Desember, 2016, diakses pada 22 Desember 2022, https://www.washingtonpost.com/world/amid-uncertainties-2017-will-test-taiwans-national-security/2016/12/31/b99563a8-cf97-11e6-a87f-b917067331bb_story.html

Ziwei, Feng. "China's military poses increased threat to Taiwan," Taiwan News, Maret, 2020, diakses pada 22 Desember 2022.
<https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3900337>

